

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2011-2013**

**ACHMAD SYAIHU
8155087995**



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Jakarta**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
KONSENTRASI PENDIDIKAN AKUNTANSI
JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2016**

**THE INFLUENCE OF REGIONAL OWN REVENUE AND
GENERAL ALLOCATION OF FUNDS FOR CAPITAL
EXPENDITURE ON CENTRAL JAVA PROVINCIAL
GOVERNMENT FISCAL YEAR 2011-2013**

**ACHMAD SYAIHU
8155087995**



*This thesis Compiled As One Getting Requirements Education Bachelor's
Degree In Economics Faculty of the State University of Jakarta*

**ECONOMIC EDUCATION STUDY PROGRAM
CONCENTRATION OF ACCOUNTING EDUCATION
DEPARTMENT OF ECONOMICS AND ADMINISTRATION
FACULTY OF ECONOMICS
JAKARTA STATE UNIVERSITY
2016**

ABSTRAK

Achmad Syaihu. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Belanja modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) untuk pengadaan aset daerah sebagai investasi daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah memiliki pedoman anggaran dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD disusun berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing (belanja daerah dalam hal ini belanja modal) serta kemampuan pendapatan daerah (PAD dan DAU). Berdasarkan hal itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh PAD dan DAU dengan Belanja Modal.

Dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan metode survei. Penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan. Data yang dikumpulkan merupakan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal dari APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2013 dengan populasi terjangkau sebanyak 35 kabupaten/kota diperoleh sampel sebanyak 32 kabupaten/kota dengan menggunakan tabel *Issac Michael*.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Dalam mengolah data peneliti menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 16. Model regresi linier berganda dalam penelitian ini yaitu $Y = -0.280 + 0.294X_1 + 0.660X_2$. Hasil dari penelitian ini memiliki nilai t hitung PAD = 2.406 dan DAU = 4.059 dengan nilai t tabel sebesar 2.045 sehingga variabel bebas PAD dan DAU berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap PAD dan DAU diperoleh nilai F hitung sebesar 17.176 dengan F tabel sebesar 3.33 yang berarti PAD dan DAU secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.

ABSTRACT

Achmad Syaihu. The Influence Of Regional Own Revenue And General Allocation Of Funds For Capital Expenditure On Central Java Provincial Government Fiscal Year 2011-2013 Faculty Of Economy State University of Jakarta. Thesis, Jakarta: Concentration in Accounting Education, Economics Education Studies Program, Department of Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, in 2016.

This study aims to determine whether regional own revenue (PAD) and the General Allocation Fund (DAU) positive and significant impact on Capital Expenditure (Belanja Modal) on Regency / City in Central Java province.

Capital expenditure carried out by the Local Government (LG) for the procurement of local assets as an investment area with the aim to improve the welfare of society. In financial management, local governments have the budget guidelines in the form of the Regional Budget (APBD). Budgets are prepared based on the needs of each area (shopping area in this case capital expenditure) as well as the ability of local revenue (PAD and DAU). Based on that, the researchers wanted to know how the effects of PAD and DAU with Capital Expenditure.

In this study collected data using a survey method. The study was conducted at the Regional Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance. The data collected is Regional Own Revenue, General Allocation Fund and the Capital Expenditure of district budgets / town in Central Java province in 2011-2013 with a reasonable population of 35 districts / cities obtained a sample of 32 districts / cities using the table *Issac Michael*.

The analysis in this study using multiple linear regression analysis. In data processing applications help researchers used SPSS version 16. The multiple linear regression model in this study is $Y = -0280 + 0.294X1 + 0.660X2$ The results of this study have t value = 2,406 PAD and DAU = 4,059 with a value of 2,045 t table so that the independent variable PAD and DAU partial effect on capital spending.

Based on testing that has been performed on the PAD and DAU obtained calculated F value of 17.176 with F table at 3.33, which means the PAD and DAU simultaneously affect the capital expenditure.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Dedi Purwana E.S., M.BUS
NIP. 196712071992031001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Drs. Nurdin Hidayat, MM., M.Si</u> NIP. 19661030 200012 1 001	Ketua		10 Februari 2016
2. <u>Ati Sumiati, S.Pd., M.Si</u> NIP. 19790610 200801 2 028	Sekretaris		10 Februari 2016
3. <u>Dr. Mardi, M.Si</u> NIP. 19600301 198703 1 001	Penguji Ahli		9 Februari 2016
4. <u>Santi Susanti, S.Pd., M.Ak.</u> NIP. 19770113 200501 2 002	Pembimbing I		9 Februari 2016
5. <u>Dra. Sri Zulaihati, M.Si.</u> NIP. 19610228 198602 2 001	Pembimbing II		9 Februari 2016

Tanggal Lulus: 28 Januari 2016

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 15 Februari 2016
Yang membuat pernyataan



Achmad Syaihu
NIM 8155087995

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011-2013”*.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Ekonomi & Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam menyusun laporan ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
2. Drs. Nurdin Hidayat M.M., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi & Administrasi;
3. Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi;
4. Santi Susanti, S.Pd., M.Ak., selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan Akuntansi serta Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dengan kesabaran penuh;
5. Dra, Sri Zulaihati, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan segenap hati agar skripsi ini selesai dengan baik;

6. Orang tua penulis yang selalu mensupport;
7. Teman seperjuangan skripsi, Zakky, Fauzan, Finda, Laras, Nichi, Putri, Agam, dan Herry

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Jakarta, 16 Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Nomor	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Identifikasi Masalah.....	11
C.Pembatasan Masalah.....	11
D.Perumusan Masalah	12
E.Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORITIK	14
A.Deskripsi Konseptual.....	14
B.Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	40
C.Kerangka Teoritik	41
D.Perumusan Hipotesis	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48
A.Tujuan Penelitian	48
B.Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian.....	48

C. Metode penelitian	48
D. Populasi dan Sampel.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data/Instrumen Penelitian.....	51
F. Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data	60
B. Uji Persyaratan Analisis	66
C. Uji Asumsi Klasik	69
D. Uji Hipotesis	75
E. Pembahasan	78
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	
A. Kesimpulan	82
B. Implikasi	83
C. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	85
RIWAYAT HIDUP.....	107

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
Lampiran I	Surat Permohonan Izin Penelitian Skripsi 91
Lampiran II	Surat Tempat Penelitian 92
Lampiran III	Data Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013 93
Lampiran IV	Data Dana Alokasi Umum Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013 94
Lampiran V	Data Belanja Modal Kab/ Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013 95
Lampiran VI	Hasil Perhitungan Dengan Menggunakan Program Aplikasi SPSS versi 16 96
Lampiran VII	Tabel Uji <i>Durbin Watson</i> 104
Lampiran VIII	Tabel Distribusi t 105
Lampiran IX	Tabel Distribusi F 106

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
I.1	Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014... 9
I.2	Dana Alokasi Umum se-Jawa Bali Tahun 2011-2014 10
IV.1	Deskripsi Statistik 60
IV.2	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 61
IV.3	Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 63
IV.4	Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 65
IV.5	<i>One Simple Kolmogov-Smirnov Test</i> 67
IV.6	Uji Multikolinieritas 68
IV.7	Uji Autokorelasi 70
IV.8	Uji Heterokedastis 72
IV.9	Model Regresi 73
IV.10	Uji Partial (t) 75
IV.11	Uji Simultan (F) 76
IV.12	Koefisien Determinasi 77

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
I.1	Daftar Alokasi Belanja Modal Provinsi di Indonesia Tahun 2013..... 7
III.1	Konstelasi Hubungan Antar Variabel 49
IV.1	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 61
IV.2	Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 64
IV.3	Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 65
IV.4	<i>Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual</i> 68
IV.5	<i>Scatter Plot</i> 69
IV.6	Uji Heteroskedastisitas PAD 72
IV.7	Uji Heteroskedastisitas DAU 73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya otonomi daerah yang dimulai sejak era reformasi merupakan buah hasil dari desentralisasi fiskal dibanding dahulu yang masih tersentralisasi dari pemerintah pusat. Dalam buku Hessel Nogi, Mahfud MD menerangkan mengenai desentralisasi fiskal yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus daerah mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi.¹

Tujuan dari desentralisasi fiskal antara lain: (1) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;(2) tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien dan adil; (3) mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro serta;(4) meningkatkan kualitas pelayanan publik didaerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.²

Kini pemerintah pusat memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya sendiri dengan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki didaerahnya. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan

¹ Hessel Nogi Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Grasindo, 2007)h. 1

² Anggito Abimanyu dan Andie Megantara, *Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, Dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2009)h.566

pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Bagir Manan, otonomi mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintah yang diserahkan atau dibiarkan sebagai urusan rumah tangga satuan pemerintahan lebih rendah yang bersangkutan.³

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, pemerintah menggunakan anggaran daerah yang biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 yang dinyatakan dalam PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).⁴ Proses penyusunan APBD melibatkan pihak eksekutif (pemerintah daerah) dan pihak legislatif (DPRD). Eksekutif memiliki tugas sebagai pelaksana operasional daerah yang wajib membuat rancangan APBD, sedangkan legislatif memiliki tugas mensahkan rancangan APBD yang sudah dibuat oleh pihak eksekutif.

APBD yang telah dibuat dan disahkan menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

³ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni,1997),h. 268

⁴ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2005* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2007),h.83

Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 pada pasal 21 sumber pembiayaan yang penting bagi pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD), komponennya yaitu penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah agar pelayanan untuk kepentingan masyarakat lebih baik, salah satunya adalah belanja untuk pembangunan infrastruktur di daerah yang bersangkutan seperti pembangunan jalan, jaringan dan irigasi. Namun peningkatan PAD tidak diikuti dengan naiknya porsi untuk belanja modal.

Dari sumber yang didapat, Anggota DPR RI Yudi Widiana Adia menyoroti politik anggaran Kota Bandung yang saat ini belum berpihak pada kepentingan publik. Yudi mencontohkan dari Rp. 600 miliar PAD Kota Bandung, sebanyak 50 persen dialokasikan untuk dana hibah, dan 50 persen lagi dialokasikan untuk dana bansos yang sulit diukur dampak keberhasilannya bagi pembangunan kota, “Rakyat dipaksa membiayai sendiri untuk fasilitas publik yang berhak mereka nikmati”, tuturnya.⁵

Tidak hanya salah pengalokasian anggaran untuk dana yang kurang efisien, tetapi anggaran tersebut lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai daripada belanja modal. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, selama lima tahun terakhir 40% - 45% belanja APBD dialokasikan untuk belanja pegawai sedangkan

⁵ Erna Mardiana, *Pemkot Bandung Dinilai Gagal Kelola APBD dan Tata Ruang*, 17 Juli 2012, (<http://m.detik.com/bandung/read/2012/07/17/165739/1967571/486/>), diakses pada 30 November 2012

porsi belanja modal reratanya 22% - 29%. Namun pada kenyataannya, 60% daerah kabupaten/kota belanja pegawainya diatas 50%, “tutur Yuswandi Temenggung Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Menurut Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), ada daerah yang belanja pegawainya hampir 77% sisanya 23% dibagi menjadi beberapa item yaitu hibah, barang jasa, belanja modal dan belanja lainnya.⁶

Besarnya alokasi APBD yang dimiliki pemerintah daerah belum bisa diserap seluruhnya untuk kepentingan masyarakat, dana tersebut disimpan oleh pemerintah daerah di bank. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, APBD yang mengendap di bank pada akhir tahun 2002 dan akhir tahun 2009 masing-masing senilai Rp. 22,18 triliun dan Rp. 59,81 triliun. Per akhir desember 2011 nilainya meroket menjadi Rp. 80,4 triliun dengan rincian Rp. 13,12 triliun di simpanan berjangka, Rp. 45,77 triliun di rekening giro dan Rp. 919 miliar di tabungan. Menurut Robert Endi Jaweng Direktur Eksekutif KPPOD, besarnya endapan dana di bank memang disengaja pemerintah daerah untuk mendapatkan bunga bank. Bunga bank itu dijadikan sumber alternatif pendapatan asli daerah. Persoalannya bunga itu tidak jelas apakah kembali ke pemerintah atau tidak. Dana itu pada dasarnya adalah dana yang tidak terserap sehingga menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa), umumnya adalah belanja modal yang mayoritas untuk pembangunan infrastruktur.⁷

⁶ Jibi, *Anggaran Negara : pemerintah dorong belanja modal daerah*, 30 April 2012 (<http://www.bisnis-kti.com/index.php/2012/04/anggaran-negara-pemerintah-dorong-daerah-belanjakan-modal-lebih-besar>), diakses pada 10 Desember 2012.

⁷ Riza Fathoni, *Dana Pembangunan di Bank*, Harian Kompas, 08 Oktober 2012, hal 17.

Tiap-tiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam usaha membangun daerahnya, hal ini menimbulkan perbedaan fiskal antara satu daerah dengan daerah yang lain. Berdasarkan Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan adanya dana perimbangan ini diharapkan pemerintah daerah bisa menggunakannya untuk membiayai belanja modal didaerahnya.

Akan tetapi penggunaan atas dana transfer dari pusat berupa DAU banyak yang tidak tepat sasaran. Dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya yaitu seharusnya untuk membangun infrastruktur didaerahnya masing-masing tetapi digunakan untuk belanja pegawai. Wakil Presiden Boediono mencontohkan DAU yang digelontorkan ke daerah banyak yang tidak sesuai peruntukannya. Misalnya untuk belanja pegawai sesuai aturan yang ada, dana itu tidak boleh untuk honorarium dan gaji. Namun, masih saja ada daerah yang salah paham menerapkan anggaran tersebut.⁸

Terkait dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang begitu besar tentu dapat memicu timbulnya korupsi ditubuh pemerintahan apabila tidak ada pengawasan yang ketat terhadap anggaran tersebut. Sudah seharusnya anggaran yang jumlahnya signifikan itu digunakan sebaik-baiknya untuk

⁸ Kuntadi, *Wapres Kritik Pemda Soal DAU*, 4 Oktober 2012, (<http://m.sindonews.com/read/2012/10/04/22/676813/wapres-kritik-pemda-soal-dau>), diakses pada 11 Desember 2012

kepentingan khalayak ramai. Namun justru sebaliknya, anggaran banyak diselewengkan. Dari catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sebanyak 24 kepala daerah/mantan kepala daerah terjerat kasus tindak pidana korupsi sepanjang 2012. Menurut Apung aktivis ICW, para kepala daerah ini terjerat korupsi yang berkaitan dengan mafia anggaran dan dana bantuan sosial serta hibah.⁹

Dari beberapa faktor pertimbangan diatas, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum adalah faktor yang paling mempengaruhi atas belanja modal pemerintah daerah karena kedua hal tersebut merupakan item dalam APBD yang jumlahnya besar dan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk membangun daerahnya.

Menyoroti pentingnya belanja modal diungkapkan dari pernyataan Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam redaksi Metro Bali bahwa porsi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus ditingkatkan, bahkan hingga dua kali lipat, agar mendorong pembangunan infrastruktur dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

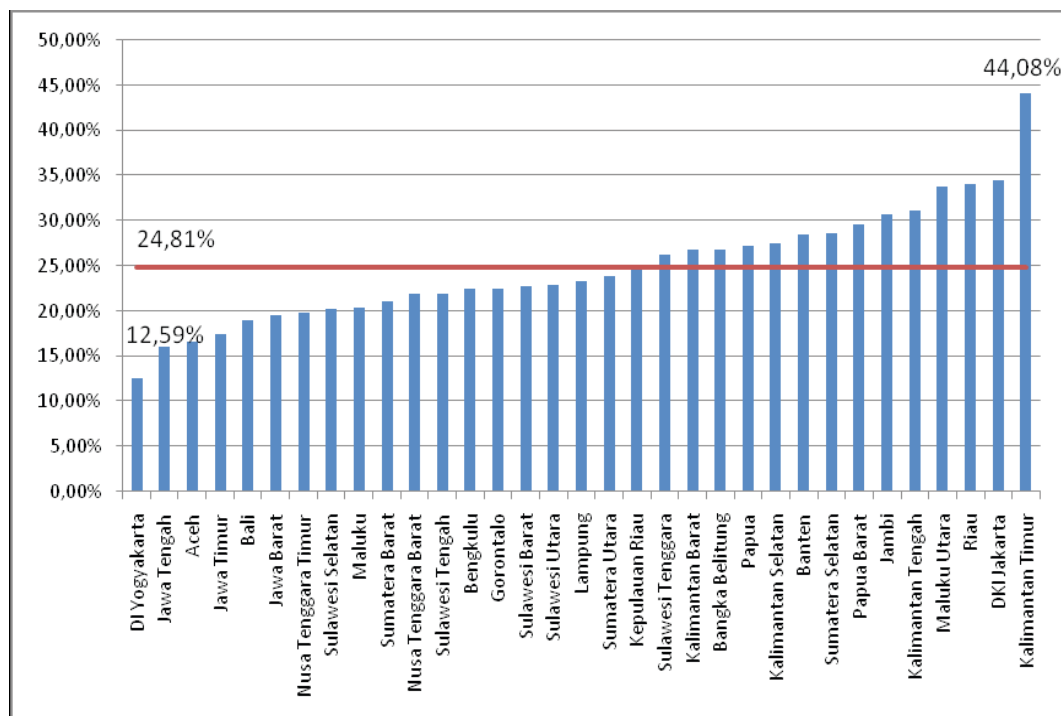
”Belanja operasional, belanja pegawai harus dikurangi karena memang tidak produktif, sementara kebutuhan infrastruktur didaerah adalah kunci utama pembangunan. Maka dari itu harus didorong terus untuk meningkatkan belanja modal” kata Wakil Menteri PPN/Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo.

⁹ Icha Rastika, 2012, 24 Kepala Daerah Terjerat Korupsi, 28 Desember 2012, (<http://m.kompas.com/news/read/2012/12/28/18372358/2012..24.kepaladaerah.terjerat.korupsi--nasional>), diakses pada 29 Desember 2012

Namun, peningkatan porsi belanja modal itu, kata Lukita harus disesuaikan dengan potensi dan keadaan sumber daya alam masing-masing daerah.¹⁰

Masalah minimnya pengalokasian belanja modal pun dialami oleh daerah Provinsi Jawa Tengah hal ini diketahui dari hasil studi yang dilakukan oleh Dr.Rudi Badrudin M.Si pada tahun 2013 dimuat dalam redaksi Kedaulatan Rakyat Online bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mempunyai proporsi belanja modal terhadap total pengeluaran daerah dibawah 20%.¹¹

Gambar I.1
Daftar Alokasi Belanja Modal Provinsi di Indonesia Tahun 2013



Data dari Direktorat Jendral Keuangan Daerah Tahun 2013

¹⁰ Redaksi Metro Bali, *Bappenas:Optimalkan Belanja Modal Tumbuhkan Ekonomi Daerah*, 14 Agustus 2014 (<http://metro.bali.com/2014/08/14/bappenas-optimalkan-belanja-modal-tumbuhkan-ekonomi-daerah/>) diakses pada 26 November 2014

¹¹ Rudi Badrudin, *Efektivitas Anggaran Pembangunan*, 22 Maret 2013 (<http://krjogja.com/liputan-kehusus/analisis/1811/efektivitas-anggaran-pembangunan.kr>) diakses pada 26 November 2014

Dari grafik diatas diketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah sangat rendah dalam mengalokasikan belanja modalnya yaitu dibawah 20% diikuti oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang mengalokasikan belanja modalnya sangat besar yaitu 44,08%.

Idealnya alokasi untuk belanja modal tersebut harus dialokasikan sebesar 30 persen(%) dari belanja daerah karena hal itu telah tertuang dalam Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014

Bukan hanya masalah minimnya pengalokasian belanja modal saja yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Tengah, tetapi juga masalah pendapatan asli daerah(PAD) yang lebih rendah dari potensi daerahnya. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BPKP Mardiasmo yang menuturkan bahwa realisasi PAD Jawa Tengah(Jateng) tahun 2013 tercatat Rp. 8,3 triliun dari target Rp. 7,8 triliun. Jumlah itu menurutnya masih bisa ditingkatkan mengingat potensi Jateng yang demikian besar. Ironisnya, target PAD 2014 sangat rendah, hanya 8,4 triliun. Menurutnya, ada tiga potensi sumber PAD, yakni penerimaan pajak kendaraan bermotor(PKB), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pemasukan dari perusahaan daerah. Khusus perusahaan daerah harus dievaluasi secara komprehensif untuk mengetahui mana yang bonafit dan mana yang justru

membebani keuangan daerah. Selain itu, retribusi juga bisa digenjut. Pendapatan retribusi juga bisa naik kalau pelayanan kepada masyarakat bagus.¹²

Sebelumnya dari tahun 2011-2013 PAD pada provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan yang progresif. Hal ini diketahui dari data yang diperoleh pada Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Namun di tahun 2014 PAD Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan yang kurang signifikan.

Tabel I.1

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014

(dalam jutaan rupiah)

Pendapatan Asli Daerah	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Jawa Tengah	Rp.5.088.713	Rp.6.629.136	Rp.8.212.800	Rp.8.347.875

Sumber: DJPK Kemenkeu

Meskipun pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan yang kurang signifikan akan tetapi provinsi tersebut mendapatkan bantuan dana transfer dari pusat yang berbentuk dana alokasi umum(DAU) cukup besar di tahun 2014. Hal ini diketahui dari laman okezone.com yaitu adapun provinsi yang memperoleh alokasi DAU Tahun Anggaran 2014 terbesar diantaranya adalah Jawa Tengah Rp.1,803 triliun, Jawa Barat Rp.1,687 triliun,

¹² Anton Sudibyo, *PAD Jateng Lebih Rendah Dari Potensi*, 4 Oktober 2014 (<http://berita.suaramerdeka.com/pad-jateng-lebih-rendah-dari-potensi/>) diakses pada 19 November 2014

Jawa Timur Rp. 1,866 triliun, Sumatera Utara Rp. 1,349 triliun dan Kalimantan Barat Rp. 1,290 triliun.¹³

Dari data yang didapat pada Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Jawa Tengah mendapatkan transfer dari pemerintah pusat dari tahun 2011-2014 mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan dengan beberapa provinsi di Jawa-Bali.

Tabel 1.2

Dana Alokasi Umum seJawa-Bali Tahun 2011-2014

(dalam ribu rupiah)

Provinsi	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Banten	Rp460.383.683	Rp530.833.378	Rp617.081.101	Rp728.490.012
DKI Jakarta	Rp209.909.442	Rp275.327.857	Rp299.182.466	Rp85.985.282
Jawa Barat	Rp1.181.553.108	Rp126.996.076	Rp1.472.453.011	Rp1.687.686.386
Jawa Tengah	Rp1.276.180.223	Rp1.516.892.951	Rp1.670.859.369	Rp1.803.931.189
Jawa Timur	Rp1.347.501.699	Rp1.491.561.136	Rp1.632.648.287	Rp1.866.548.185
DIY	Rp620.812.328	Rp757.056.696	Rp828.334.768	Rp899.923.550
Bali	Rp560.673.539	Rp694.079.080	Rp792.365.876	Rp832.277.473

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, data diolah oleh penulis

Menurut tabel diatas Provinsi Jawa Tengah mendapatkan porsi yang cukup besar dari tahun 2011-2014 yaitu lebih dari 1(satu) triliun rupiah bersama dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.

Dengan adanya bantuan dari pusat berupa DAU diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat lebih meningkatkan lagi pelayanannya kepada publik dan dapat mengalokasikan belanja daerahnya ke hal yang lebih produktif.

¹³ Silvia Ramadhani, *Ini Provinsi dan Kabupaten dengan Alokasi Dana Triliunan*, 2 Februari 2014 (<http://m.okezone.com/read/2014/02/20/934953/ini-provinsi-dan-kabupaten-dengan-alokasi-dana-triliunan>) diakses pada 19 November 2014

Untuk dapat mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah(PAD) dan dana alokasi umum(DAU) terhadap belanja modal. Oleh karena itu peneliti mengambil objek penelitian pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikarenakan peningkatan PAD yang kurang signifikan meskipun dengan adanya bantuan dari pusat berupa DAU yang cukup besar apakah memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Besarnya jumlah pendapatan asli daerah yang penggunaannya belum berpihak pada kepentingan publik.
2. Sedikitnya proporsi anggaran untuk belanja modal dibandingkan belanja pegawai.
3. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengendap di Bank.
4. Dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum(DAU) banyak yang tidak tepat sasaran
5. Penyalahgunaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Pembatasan Masalah

Karena terbatasnya waktu, tenaga serta sarana yang tersedia, maka penulis membatasi permasalahan kepada pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Dengan batasan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membangun daerahnya. Pendapatan asli daerah di ukur dari jumlah pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.
2. Dana Alokasi Umum diukur berdasarkan jumlah dari celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal diperoleh dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal. Alokasi dasar diperoleh berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.
3. Belanja Modal diukur dari jumlah keseluruhan atas belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan serta belanja aset lainnya.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal?.”

E. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan, kegunaan tersebut dapat berdampak teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bagi penulis

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman tentang objek yang diteliti sekaligus menjadi perbandingan antara teori perkuliahan dengan kenyataan di lapangan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

b) Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan kepada pemerintah pusat dan daerah yang berguna dalam menyusun kebijakan dimasa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi khususnya akuntansi pemerintahan.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Belanja Modal

1.1 Definisi Belanja Modal

Belanja modal merupakan termasuk salah satu dalam penganggaran belanja daerah pada pemerintahan daerah.

“Menurut Halim belanja daerah digolongkan menjadi empat yakni belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tak terduga. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi 3(tiga) yakni belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan”.¹⁴

Salah satu syarat utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik adalah adanya belanja modal. Belanja modal merupakan suatu cara bagi pemerintah daerah untuk memperoleh aset yang nantinya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan manfaatnya bisa dirasakan lebih dari satu periode akuntansi.

Secara singkat Mardiasmo menerangkan tentang belanja modal yaitu ”belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset)”.¹⁵ Setelah aset tersebut diperoleh maka diperlukan adanya

¹⁴ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2008) h.22

¹⁵ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2002) h. 187

pemeliharaan atas pemakaian aset tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Abdul Halim dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Keuangan Daerah*, yaitu :

“Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang sifatnya rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan”.¹⁶

Belanja modal dapat juga dikatakan sebagai pengeluaran pembangunan, seperti yang dikemukakan oleh Revrison Baswir yaitu “pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi dan ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sebagai salah satu faktor pembangunan nasional”.¹⁷

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai pembangunan nasional dan memperoleh aset sekaligus dapat digunakan untuk investasi yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta disertai biaya pemeliharaannya guna menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset tersebut.

1.2 Kategori Belanja Modal

Tidak semua belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan belanja modal, tetapi suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila memenuhi kriteria :

- 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah umur manfaat dan kapasitas.

¹⁶ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 72

¹⁷ Revrison Baswir, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 1993), h. 39

- 2) Pengeluaran tersebut melebihi batas minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau dibagikan.¹⁸

1.3 Kriteria Belanja Modal

Disamping belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap dan aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai belanja modal. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki.
- 2) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya.¹⁹

1.4 Jenis-jenis Belanja Modal

Belanja modal meliputi antara lain :

- 1) Belanja modal tanah
Merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, baik balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- 2) Belanja modal peralatan dan mesin
Merupakan pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- 3) Belanja modal gedung dan bangunan
Merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan /penambahan/ penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

¹⁸ Runa Inawan, 04 Juni 2014, *Konsep Belanja Modal Pada Sistem Akuntansi Pemerintahan*, (<http://blog.sivitas.lipi.go.id/blog.cgi?cetakisiblog&1262743373&&1036006250&&1388155399&runa005&1281060205>) diakses pada 10 September 2014

¹⁹ *Ibid, h.1*

- 4) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
Merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/peningkatan pembangunan serta perawatan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap digunakan.
- 5) Belanja modal fisik lainnya
Merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/ penggantian/peningkatan pembangunan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam belanja modal diatas.²⁰

2. Pendapatan Asli Daerah

2.1 Dasar Hukum Pemungutan Pendapatan Asli Daerah diantaranya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berikut ini beberapa peraturan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah:

1. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
4. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi²¹

²⁰ Tulis S. Meliala, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Semesta Media, 2007) h. 48

²¹ Machfud Sidik, *Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal*, (Jakarta: Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah DepKeu RI, 2004) h. 57

2.2 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang disadur dalam bukunya Nunuy Nur Afiah, “Pendapatan merupakan semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali”.²²

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menerangkan bahwa PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah ini digunakan oleh pemerintah daerah guna melakukan kewajibannya yaitu melayani masyarakat. Tanpa adanya sumber pendapatan ini pemerintah daerah akan sulit dalam memenuhi setiap kebutuhan didaerahnya.

Menurut Indra Bastian Pendapatan Asli Daerah adalah “pendapatan yang meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu

²² Nunuy Nur Afiah, *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) h.44

dibayar kembali oleh daerah”.²³ Pendapat lain dikemukakan oleh Ahmad Yani yang menjelaskan secara rinci tentang PAD:

“Pendapatan Asli Daerah meliputi pendapatan yang bersumber dari hasil pajak, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.²⁴

Pendapat serupa pun dijelaskan oleh Bachtiar Arif mengenai PAD yaitu “pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.²⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang menjadi hak daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain daerah yang sah dalam mewujudkan otonomi daerah.

2.3 Komponen yang terdapat dalam Pendapatan Asli Daerah

Dalam pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah terdapat beberapa komponen yang digunakan dalam rangka melayani kebutuhan pelayanan publik yaitu:

²³ Indra Bastian, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat,2006), h.43

²⁴ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo,2008), h. 51

²⁵ Bachtiar Arif, dkk, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta: Akademia,2009) h. 138

2.3.1 Pajak daerah

1. Teori Welfare State

Otto von Bismarck mengemukakan prinsip dasar dari teori *welfare state* yaitu “bahwa negara/pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun”.²⁶ Dalam hal ini pemerintah daerah memungut pajak daerah dari masyarakat sebaiknya pajak daerah tersebut juga digunakan untuk kepentingan publik sehingga tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat dapat terpenuhi.

2. Teori Kemanfaatan (*Utility*)

Dalam pengelolaan pajak agar sesuai dengan pelaksanaan dari otonomi daerah selayaknya pemanfaatan pajak harus diupayakan untuk pelayanan kepada sektor pajak yang bersangkutan. Pemungutan atas pajak seharusnya juga memperhatikan asas kemanfaatan agar timbul kesadaran dari wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak secara sukarela. Teori utilitas ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill.²⁷

Adanya teori *welfare state* dan teori kemanfaatan dikarenakan berkaitan dengan asas teori ini yang menghendaki adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Sedangkan

²⁶ Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia* (Jakarta: Yellow Printing, 2007) h. 36

²⁷ *Ibid*, h. 42

teori utilitas atau kemanfaatan menekankan bahwa hendaknya pungutan terhadap pajak daerah memiliki manfaat terhadap wajib pajak khususnya masyarakat umum di daerah tersebut.

Pajak daerah merupakan sumber utama PAD, wewenang yang luas kepada daerah untuk menetapkan pajak hendaknya tidak dijadikan pungutan yang ilegal bagi daerah.

Dalam bukunya Ilmu Hukum Pajak, Brotodiharjo menerangkan :

“Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintahan”.²⁸

Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa pajak sifatnya dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan langsung dari pemerintah dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan negara. Pajak dapat dikenakan kepada orang pribadi ataupun badan. Rochmat Soemitro menerangkan bahwa:

“Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.²⁹

Kewenangan pajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi atau Daerah Tingkat I dan kotamadya atau kabupaten atau Daerah Tingkat II. Pemerintah daerah tersebutlah yang berhak memungut pajak daerah. Tony Masyahrul menjelaskan bahwa “pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik

²⁸ Santoso Brotodiharjo, *Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Refika Aditama, 1998), h. 2

²⁹ Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, (Bandung: Eresco, 1982) h. 148

pemerintah Tingkat I maupun pemerintah daerah Tingkat II) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah”.³⁰

Menurut Davey pajak daerah adalah:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang diterapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah.³¹

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Menurut Tjip Ismail, Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

1. Pajak Provinsi

Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
Pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang menghasilkan sumber daya energi menjadi tenaga gerak, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak

³⁰ Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Grasindo,2004) h. 5

³¹ Davey, K.J, *Pembiayaan Pemerintah Daerah:Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga* (Jakarta: UI-Press, 1988) h. 39

- atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

2. Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, atau fasilitas lainnya yang dipungut bayaran.
- b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan yang dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*.
- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukkan, permainan, ketangkasan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang yang dipungut bayaran. Tidak termasuk fasilitas umum untuk berolahraga.
- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial.
- e. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.³²

Untuk menilai potensi suatu jenis pungutan yaitu pajak daerah diperlukan suatu seperangkat kriteria. Berikut merupakan kriteria-kriteria yang diungkapkan oleh Davey :

³² Tjip Ismail, *OpCit*, h. 185

1. Kecukupan
Persyaratan yang pertama dari suatu sumber penerimaan tentu saja adalah kecukupan dari perolehan sumber tersebut terutama apabila dikaitkan dengan biaya pelayanan yang harus diberikan.
2. Keadilan
Yakni bahwa beban untuk belanja publik sebaiknya ditanggung oleh masyarakat secara proporsional dengan kekayaan mereka.
3. Kemampuan administratif
Tuntutan kemampuan administrasi dalam hal keahlian, integritas untuk berbagai sumber penerimaan.
4. Kesepakatan politis
Dibutuhkan suatu kesepakatan bersama bila dirasakan perlu dalam pengambilan keputusan perpajakan.
5. Efisiensi ekonomi
Penilaian atas suatu pajak juga harus dilihat dari pengaruhnya atas keputusan wajib pajak, mengonsumsi produk, menabung, dan berinvestasi.
6. Kesesuaian sebagai pungutan daerah
Pemerintah daerah punya kewenangan dalam menentukan tarif, membuat keputusan akan berbagai tingkatan pajak, serta menentukan pelayanan yang diberikannya.³³

Ronald John Hy dan William L Waugh, JR berpendapat bahwa *"states are always looking for ways to acquire additional revenues without raising taxes. Free and user charges are commonly used"*.³⁴

Maksud dari pernyataan Ronald John Hy dan William L. Waugh, JR adalah dalam meningkatkan pendapatan, pemerintah daerah tidak harus selalu memperoleh pendapatan dengan meningkatkan pajak, akan tetapi harus berpaling pada retribusi.

2.3.2 Retribusi daerah

Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya adalah retribusi daerah. Menurut Hanif Nurcholis, retribusi daerah adalah "pungutan daerah

³³ Davey, *Op Cit*, h.40

³⁴ Ronald John Hy and William L. Waugh, JR, *State and Local Tax Policies. A Comparatives Handbook*, (London , Connecticut: Greenwood Press, Wesport, 1995) h.23

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.³⁵ Berbeda dengan pajak daerah yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah daerah, pada retribusi masyarakat membayarkan iuran tersebut untuk memperoleh izin dari pemerintah daerah untuk kepentingan masing-masing orang pribadi atau badan.

Selanjutnya menurut Marihot P. Siahaan menerangkan bahwa

“Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan, jasa tersebut bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara”.³⁶

Nasrun dalam Kaho menjelaskan bahwa retribusi adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha milik daerah untuk kepentingan umum / karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”.³⁷

Tidak jauh berbeda Soemitro menerangkan mengenai retribusi yaitu “iuran rakyat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang dengan mendapatkan jasa balik/kontraprestasi dari pemerintah”.³⁸

³⁵ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 99

³⁶ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 5

³⁷ Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) h.152

³⁸ Soemitro Rochmad, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak* (Jakarta: Eresco, 1979) h.17

Jadi retribusi daerah adalah suatu pemungutan yang dilakukan pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa pekerjaan usaha milik daerah yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah secara langsung.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat.

Yang termasuk kedalam kriteria retribusi daerah yaitu :

1. Retribusi daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah
2. Dalam pungutannya terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontraprestasi (balas jasa) yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Dikenakan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa yang disediakan negara.³⁹

Retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya, yaitu

1. Retribusi Jasa Umum

Yang termasuk kedalam retribusi jasa umum yaitu;

1. Pelayanan kesehatan
2. Pelayanan kebersihan dan persampahan
3. Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP)
4. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
5. Pelayanan parkir ditepi jalanan umum
6. Pelayanan pasar yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar.
7. Pelayanan air bersih yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah, tidak termasuk pelayanan oleh Perusahaan Daerah Air Minum

³⁹ Raharjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 122

8. Pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
9. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran
10. Pengujian kapal perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah

2. Retribusi Jasa Usaha

Adapun yang termasuk dalam retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

1. Pemakaian kekayaan daerah, seperti pemakaian tanah dan bangunan untuk pesta, pemakaian kendaraan untuk alat-alat berat milik pemerintah daerah
2. Pasar grosir atau pertokoan. Termasuk tempat pelelangan ikan, ternak dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
3. Pelayanan terminal untuk penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis yang dikelola oleh pemerintah daerah
4. Pelayanan tempat khusus parkir
5. Pelayanan tempat penitipan anak
6. Penginapan/Villa
7. Penyedotan kakus
8. Rumah potong hewan
9. Tempat rekreasi dan olahraga
10. Penyebrangan diatas air

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan dapat digunakan sebagai instrumen untuk membina, mengatur, mengendalikan maupun untuk pengawasan disamping sebagai sumber pendapatan bagi daerah.

Retribusi perizinan tertentu antara lain :

1. Izin peruntukkan penggunaan tanah. Pemberian izin atas penggunaan tanah kepada badan usaha yang akan menggunakan tanah seluas 5000 meter persegi atau lebih.
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
3. Izin tempat penjualan minuman beralkohol. Pelayanan izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu di wilayah kekuasaan pemerintah daerah.
4. Izin trayek. Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.
5. Izin pengambilan hasil hutan. Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha pengambilan hasil hutan antara lain rotan dan gaharu, tidak termasuk pengambilan kayu hutan.⁴⁰

Dari kedua pendapatan asli daerah yaitu pajak dan retribusi terdapat beberapa perbedaan yaitu :

1. Kontra prestasinya
Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung baik secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung
2. Balas jasa pemerintah
Pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang bebas dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi
3. Sifat pemungutannya
Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk
4. Sifat pelaksanaannya
Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.

⁴⁰ Ahmad Yani, *Op Cit*, h.64

5. Lembaga atau badan pemungutnya
Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat oleh pemerintah pusat ataupun daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah⁴¹

Menurut Mikesell keuntungan dari retribusi itu sendiri yaitu :

*“First, user charge can register and record public demand a service. Second, the user charge can dramatically improve equity of financing selected service. Third, a user charge program may improve operating efficiency, as agency staff must respond to client demand”.*⁴² (Pertama, retribusi terdaftar dan tercatat sebagai jasa pelayanan publik, kedua, retribusi dapat meningkatkan ekuitas jasa keuangan, ketiga, program retribusi dapat meningkatkan efisiensi operasi, lembaga harus merespon permintaan klien (pengguna retribusi).

2.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Menurut Abdul Halim, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan “penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”.⁴³

Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Jenis Pendapatan ini mencakup :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD).
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN).
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.⁴⁴

⁴¹ Slamet Munawir, et al., *Perpajakan untuk SLTA* (Yogyakarta: BPFE UGM, 1990) h. 4

⁴² Mikesell, *Fiscal Administration Analysis and Application For the Public Sector*, (Illinois: The Dorsey Press Homewood, 1982) h 275

⁴³ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2007) h. 98

⁴⁴ *Ibid*, h. 98

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ditetapkan bahwa kebijakan pengembangan BUMD ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai pihak yang mewakili pemilik modal.⁴⁵

Sebagai perusahaan daerah, BUMD memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah(PAD) baik dalam bentuk dividen ataupun pajak. BUMD pun memegang peran strategis dalam pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan pasar, dan keterlibatannya dalam pengembangan usaha kecil-menengah dan koperasi.

Perusahaan daerah atau BUMD mempunyai sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan dengan perseroan terbatas. Diantaranya yaitu:

1. Dari sisi organisasi dan manajemen: organisasi dan manajemen di perusahaan daerah didasarkan pada keputusan pemerintah daerah sedangkan di perseroan terbatas ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS).
2. Berkenaan dari sumber daya manusia: dalam perusahaan daerah rekrutmen SDM, sistem penggajian, pensiun dan penghargaan direksi diatur oleh pemerintah daerah sedangkan di perseroan terbatas, rekrutmen, sistem penggajian dan pensiun pegawai diatur oleh RUPS.
3. Permodalan: dalam perusahaan daerah modal dan perubahan-perubahannya ditentukan oleh Pemda, DPRD, dan Mendagri. Pada PT, modal dan perubahan-perubahannya diatur melalui RUPS.⁴⁶

⁴⁵ Samsul Hadi, *Jakarta Incorporation Paradigma Baru BUMD*,(Surabaya:ACC Grafika Raya,2007)h.19

2.3.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut Ahmad Yani, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah “penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan”.⁴⁷

Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan guna menambah pundi-pundi sumber pendapatan pemerintah daerah.

Jenis-jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari :

1. Jasa giro
2. Pendapatan Bunga
3. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
4. Pendapatan denda pajak
5. Pendapatan denda retribusi.⁴⁸

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam realitasnya tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah diantaranya :

1. Relatif rendahnya basis retribusi daerah
Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis dan kemampuan pendapatan masyarakat.
2. Kemampuan administrasi pemungutan didaerah yang masih rendah

⁴⁶ Hari S. Malang Joedo, *Reinventing BUMD: Kunci Sukses Mengembangkan BUMD Produktif dan Profesional*, (Jakarta: PT Gramedia, 2006) h.10

⁴⁷ Ahmad Yani, *Op Cit*, h.74

⁴⁸ Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2006) h. 148

- Salah satu sebabnya adalah diterapkannya sistem target yang relatif rendah dan pemerintah cenderung hanya memenuhi target tersebut saja.
3. Peranan penerimaan retribusi daerah tergolong kecil dalam penerimaan daerah
Rendahnya basis retribusi tiap-tiap daerah berarti memperkecil kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerah
 4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan daerah yang lemah
Hal ini mengakibatkan banyak terjadi kebocoran anggaran yang sangat berarti bagi daerah.⁴⁹

Untuk dapat mengatasi kendala-kendala tersebut pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperluas basis penerimaan
Tindakan yang dapat dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dipungut oleh daerah yaitu perhitungan ekonomi yang dianggap potensial, menghitung potensi dan kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan yaitu antara lain menyesuaikan tarif retribusi dan peningkatan kemampuan SDM.
3. Meningkatkan pengawasan
Pengawasan harus ditingkatkan antara lain memperbaiki proses pengawasan secara berkala serta menerapkan sanksi terhadap pemungut pajak dan penunggak pajak.
4. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih terarah
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait didaerah.⁵⁰

Anggaran Pendapatan Asli Daerah(PAD) yang dimiliki pemerintah daerah dapat digunakan untuk berbagai macam pembangunan yang dianggarkan kedalam belanja daerah salah satunya yaitu belanja modal.

⁴⁹ Rahajo Adisasmita, *Log Cit*, h. 107

⁵⁰ Raharjo Adisasmita, *Op Cit*, h. 111

Dari anggaran belanja modal tersebut pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk pembangunan fisik didaerahnya masing-masing dalam rangka melayani publik. Menurut Pujiharjo dan Ghozali pembangunan fisik yaitu

“Physical Development is a tool needed by the community to support economic activity. Physical development in the region, particularly for public utilities derived from the government budget (budget). The higher the budget allocated for the physical construction of public facilities (infrastructure), the higher the mobility of the people that happen”.⁵¹(Pembangunan Fisik adalah alat yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi. Pembangunan fisik di wilayah tersebut, terutama untuk kegunaan publik yang berasal dari anggaran pemerintah (anggaran). Semakin tinggi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fisik fasilitas umum (infrastruktur), semakin tinggi mobilitas orang-orang yang terjadi).

Menurut Rukmana dalam bukunya Paimin Napitupulu menuturkan tentang pelayanan jasa publik yaitu mencakup antara lain

“Air minum, listrik, jalan raya, transportasi, telekomunikasi, rumah sakit, sanitasi, sarana prasarana pasar, irigasi, drainase, pengelolaan limbah, perumahan kota, pengendalian banjir, persampahan, perbaikan kampung, kesehatan dan rencana tata ruang kota”.⁵²

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai pendapatan asli daerah terhadap belanja modal atau pembangunan diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang positif. Hal ini diketahui dari jurnal yang dipublikasikan oleh Suharjanto dan kawan-kawan(dkk), Yudani menemukan bahwa

“The results of the research for development expenditure, only own revenue has positive influence on development expenditure, while transfers and

⁵¹ Pujiharjo M., Ghozali Maski, Moh. Khusaini, "The Impact of Fiscal Decentralization on Local Economic Development In East Java", Journal of Humanities And Social Science(IOSR-JHSS) Vol 13, Jul-Aug 2013. Hal 01-07

⁵² Paimin Napitupulu, *Pelayanan Publik&Customer Satisfaction:Prinsip-Prinsip Dasar Agar Pelayanan Publik Lebih Berorientasi Pada Kepuasan dan Kepentingan Masyarakat* ,(Bandung:Alumni,2012)h.175

others revenue has not".⁵³ (hasil dari penelitian untuk pengembangan belanja, hanya pendapatan yang berpengaruh positif pada belanja pembangunan, sementara transfer dan pendapatan lain-lain belum)

Selain itu, Von Furstenberg dalam jurnal yang telah dipublikasikan oleh Septaningsih Sumarmi menyatakan dalam hipotesis penelitiannya bahwa "penerimaan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*".⁵⁴

3 Dana Alokasi Umum

3.1 Landasan Teori Dana Alokasi Umum

Transfer dari pemerintah pusat kepada daerah berupa dana alokasi umum perlu dilakukan. Hal ini didasarkan oleh:

"Pertama, untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal vertikal. Kedua, untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horisontal. Ketiga, adanya kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum disetiap daerah. Keempat, untuk mengatasi persoalan yang timbul dari menyebar atau melimpahnya efek pelayanan publik. Kelima, untuk stabilisasi dari pemerintah pusat".⁵⁵

Dasar hukum pemberian bantuan dari pusat ke pemerintah daerah berupa Dana Alokasi Umum tertera pada Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

⁵³ Suhardjanto, Djoko, Eni Jufriyah, Sri Hartoko, "The Influence Fiscal Decentralization on Public Expenditure in Indonesia", Jurnal Siasat Bisnis Vol.13 No.3, Dec 2009, hal 233-252

⁵⁴ Septaningsih Sumarmi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta", Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol.4, April 2009. Hal 55-66

⁵⁵ Machfud Sidik, Raksaka Mahi, Robert, dkk., *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Kompas, 2002) h.24

3.2 Definisi Dana Alokasi Umum

Sebelum era otonomi daerah belum dikenal istilah Dana Alokasi Umum, pada masa itu hanya dikenal istilah subsidi daerah otonom dan instruksi presiden seperti yang diterangkan oleh Raharjo yaitu “dana alokasi umum dimaksudkan sebagai pengganti dan transfer utama dari pusat kepada daerah yang selama ini ada yakni Subsidi Daerah Otonom (SDO) dan Instruksi Presiden (Inpres)”.⁵⁶

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk diberikan kepada daerah.

Dana alokasi umum dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Hanif Nurcholis dalam bukunya yang berjudul Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyatakan bahwa

“Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.⁵⁷

Dana alokasi umum bersifat “*block grant*” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi

⁵⁶ *Ibid*, h. 176

⁵⁷ Hanif Nurcholis, *Op cit*, h. 107

daerah.⁵⁸ Seperti yang diungkapkan oleh Dedy Supriadi dalam Raharjo mengenai maksud dari pemberian dana alokasi umum yaitu “terciptanya jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah diseluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat”.⁵⁹

Oleh karena itu, pada dasarnya pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum (DAU) kepada pemerintah daerah yang bertujuan agar pemerintah dapat membiayai kebutuhan didaerahnya sekaligus juga pemeratakan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Setiap daerah memperoleh besaran dana alokasi umum yang tidak sama. Dana alokasi umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) dan alokasi dasar. Celah fiskal daerah merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kebutuhan pendanaan daerah ini diukur dari jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita dan indeks pembangunan manusia.

Alokasi dana alokasi umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil, sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar.

⁵⁸ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2009)h.47

⁵⁹ Raharjo Adisasmita, *Log Cit*, h. 175

Berikut rumus penghitungan dana alokasi umum menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 :

$$\text{Dana Alokasi Umum} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Bobot celah fiskal} \times \text{DAU seluruh kabupaten/kota}$$

Dimana

DAU seluruh kabupaten/kota = 90 % (26 % X Pendapatan dalam Negeri Netto)

$$\text{Bobot Celah Fiskal} = \frac{\text{Celah fiskal Daerah}}{\text{Total Celah fiskal seluruh kabupaten/kota}}$$

$$\text{Celah fiskal daerah} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Dimana

Kebutuhan Fiskal = total belanja daerah rata-rata X [(bobot x indeks jumlah penduduk)+(bobot x indeks luas wilayah)+(bobot x indeks kemahalan konstruksi)+(bobot x indeks pembangunan manusia)+(bobot x indeks PDRB per kapita)]

$$\text{Kapasitas Fiskal} = \text{PAD} + \text{PBB} + \text{BPHTB} + \text{BHSDA} + \text{PPH}$$

Ket :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BPHTB = Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BHSDA = Bagi Hasil Sumber Daya Alam

PPH = Pajak Penghasilan

Alokasi dasar = Gaji PNSD dan Gaji CPNSD

Menurut Kenneth Davey, tujuan dari pemberian dana alokasi umum antara lain:

1. Merangsang pertumbuhan ekonomi regional baik untuk membantu pertumbuhan maupun untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah
2. Mengendalikan pengeluaran regional untuk memastikan penyesuaian terhadap standar dan kebijaksanaan nasional.
3. Membantu wilayah-wilayah untuk mengatasi keadaan darurat.
4. Mengembangkan wilayah-wilayah yang kapasitas fiskalnya rendah, suatu potensi yang relatif rendah untuk meningkatkan penerimaan langsung mereka.
5. Memantapkan standar pelayanan atau pembangunan yang adil.⁶⁰

3.3 Kriteria Desain Transfer Pusat ke Daerah

Kriteria ini dibuat oleh pemerintah pusat guna menjadi tolak ukur untuk melakukan transfer dari pusat ke masing-masing daerah. Beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Keadilan: besarnya dana transfer dari pusat ke daerah seyogyanya berhubungan positif dengan kebutuhan fiskal daerah
2. Transparan dan stabil: formula transfer hendaknya diumumkan sehingga dapat diakses oleh masyarakat serta formula tersebut hendaknya dapat dipakai untuk jangka panjang sehingga memudahkan penyusunan anggaran.
3. Sederhana: formula yang dipakai hendaknya relatif mudah untuk dipahami.
4. Insentif: desain dari transfer ini harus sedemikian sehingga memberikan semacam insentif bagi daerah dengan manajemen fiskal yang baik.⁶¹

⁵⁹ Davey, *OpCit*, h.202

⁶¹ Machfud Sidik, *Ibid*, h.134

3.4 Dampak Positif dari Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Koswara dalam makalahnya Machfud Sidik yang berjudul Studi Empiris Desentralisasi Fiskal memberikan perincian mengenai dampak positif dari pemberian bantuan keuangan dari pusat kepada daerah yaitu:

1. Daerah lebih mampu memacu pembangunan daerah
2. Meningkatkan pertumbuhan antar daerah yang seimbang
3. Pembagian dana yang rasional dan adil kepada daerah penghasil sumber utama penerimaan negara
4. Pemerataan pembangunan
5. Mengurangi kesenjangan sosial
6. Meredam ketidakpuasan daerah
7. Meningkatkan respek daerah terhadap pusat
8. Memperkuat integrasi nasional.⁶²

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum menghasilkan bahwa keduanya memiliki dampak positif terkait dengan belanja modal pemerintah daerah.

Hal ini diketahui dari penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim ditahun 2004 yang menyatakan bahwa “*local revenue source is the local original revenue and balance fund influence to local expenditure totally*”.⁶³(sumber pendapatan daerah yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara total memiliki pengaruh terhadap belanja daerah)

⁶² Machfud Sidik, *Studi Empiris Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Di Era Otonomi Daerah*(UI:Kuliah Perdana-Program Pasca Sarjana Fisip,2001)h.28

⁶³ Suharjanto, *LogCit*, h.237

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Prakosa pada tahun 2004, Prakosa melakukan penelitian pada 40 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY tahun 2000/2001 sampai dengan 2001-2002. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.⁶⁴

B. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian tentang hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul ini antara lain :

1. In Indarti dan Sugiartiana dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Semarang Periode 2005-2009", Penelitian ini dilakukan pada tahun 2009. Dalam penelitian ini Darwanto dan Yustikasari menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.⁶⁵

⁶⁴ Gregorius N. Masdjojo dan Sukartono, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006-2008", Jurnal TEMA vol.6 Edisi 1. Maret 2009, h. 32-50

⁶⁵ In Indarti dan Sugiartiana "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Semarang periode 2005-2009", Jurnal Fokus Ekonomi Vol.7 No.2 Desember 2012, h. 1-15

2. Nugraeni” Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”. Penelitian ini dilakukan pada 2011. Dalam penelitian ini Abdullah dan Halim menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan.⁶⁶
3. Septaningsih Sumarmi” Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I.Yogyakarta”. Dalam penelitian ini Stine menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik yang mengartikan pentingnya mengalokasikan belanja untuk kepentingan publik.⁶⁷

C. Kerangka Teoritik

Penerapan otonomi daerah berbeda dengan sebelum diberlakukannya otonomi daerah, perbedaannya terletak dari sumber-sumber dana yang digunakan.

Sebelum otonomi daerah, sumber dana yang digunakan untuk kebutuhan pemerintah daerah didaerahnya sepenuhnya disokong dari pemerintah pusat dengan kata lain daerah bergantung pada pemerintah pusat.

⁶⁶ Nugraeni,”Analsis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), dan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”, AkmenikaUPY, Vol.8 Oktober 2011, h.96-115

⁶⁷ Septaningsih Sumarmi, *OpCit*, 57

Setelah diberlakukannya otonomi daerah, ketergantungan terhadap pusat dapat dikurangi, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola pendapatannya sendiri dengan sumber daya yang dimiliki didaerahnya masing-masing. Untuk itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam menutupi segala bentuk pengeluaran atau belanja pemerintah daerah.

Seperti yang diungkapkan oleh Raharjo Adisasmita bahwa “pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah(PAD)”.⁶⁸

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan.⁶⁹

Belanja daerah terutama belanja modal sangat diperlukan untuk aktivitas pembangunan terutama pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ditiap-tiap daerah diperlukan agar hasilnya dapat dinikmati oleh segenap masyarakat yang tinggal didaerah tersebut.

⁶⁸ Raharjo Adisasmita, *OpCit*,h.101

⁶⁹ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta:Erlangga,2010), h. 18

Menurut Mardiasmo bahwa “semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD”.⁷⁰

Pembangunan infrastruktur tersebut meliputi antara lain sarana prasarana publik seperti jalan raya, pelabuhan, bandara serta jaringan tenaga listrik dan air untuk masing-masing daerah. Seperti yang dikemukakan oleh Tulis S. Meliala bahwa “belanja modal meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan”.

Menurut Suparmoko,

“Dengan adanya jalan raya terdapat lebih banyak kemudahan untuk menjangkau wilayah yang bersangkutan, demikian pula akan diperoleh lebih banyak pendapatan daerah yang berasal dari perpajakan karena berkembangnya perekonomian daerah”.⁷¹

Pemerintah daerah khususnya akan mendapat manfaat berupa kenaikan pendapatan daerah dari setiap bentuk pembangunan jalan karena perekonomian di daerah tersebut akan berkembang sebagai akibat pembangunan jalan itu.⁷²

Infrastruktur menjadi sektor penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi diberbagai daerah.

Menurut Sadono Sukirno,

“Pengaruh yang paling nyata dalam pembangunan daerah terutama berasal dari pengeluaran pembangunan karena pengeluaran pembangunan akan memperbesar jumlah prasarana yang tersedia disuatu daerah dan sebagai akibatnya daerah tersebut akan menjadi lebih menarik sebagai tempat untuk mengadakan penanaman modal, dari penanaman modal itulah pemerintah daerah dapat memungut pajak daerah sehingga dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah”.⁷³

⁷⁰ Septaningsih Sumarmi, *OpCit*,h.57

⁷¹ M.Suparmoko, *Ekonomi Publik:Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*,(Yogyakarta:ANDI Yogyakarta,2002)h.153

⁷² *Ibid*,h.167

⁷³ Sadono Sukirno, *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*,(Jakarta:LPFE UI,1985)h.75

Berdasarkan dari teori *welfare state* dan teori kemanfaatan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini pajak daerah hendaknya dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Menurut Tjip Ismail

“Penerimaan daerah yang berasal dari pajak betul-betul “dikembalikan” oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak dan masyarakat umum dalam bentuk pelayanan. Pelayanan pemerintah daerah tersebut meliputi pelayanan umum yang diperlukan oleh wajib pajak dan masyarakat umum, seperti halnya penyediaan sarana dan prasarana pemerintah, sarana dan prasarana publik, penyediaan lingkungan yang kondusif, penyediaan air bersih, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta semua bentuk pelayanan yang diperlukan untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera”.⁷⁴

Disamping Pendapatan Asli Daerah(PAD) pemerintah daerah juga mendapat bantuan (*grant*) dari pemerintah pusat yang dikenal salah satunya yaitu Dana Alokasi Umum(DAU).

Dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ditujukan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Dengan adanya DAU diharapkan dapat membantu kemandirian pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Pentingnya bantuan dari pusat diungkapkan oleh Aries Djaenuri yaitu

“Alokasi dari pemerintah pusat(*grants*) memegang peranan yang sangat penting karena pemerintah daerah tidak dapat menutup keseluruhan biaya pengeluaran hanya mengandalkan pendapatan asli daerah saja dengan tujuan yaitu pembelanjaan dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan atau program-program pembangunan”.⁷⁵

Serupa dengan Aries Djaenuri, Sugianto juga mengungkapkan pentingnya keberadaan dana alokasi umum dalam APBD yaitu

⁷⁴ Tjip Ismail, *OpCit*,h.176

⁷⁵ M.Aries Djaenuri,M.A. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah:Elemen-elemen penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah,(Bogor:Ghalia Indonesia,2012) Hal.68

“Di Indonesia bentuk transfer yang penting adalah DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah, tujuan lain adalah mengurangi kesenjangan keuangan horizontal antardaerah, mengurangi kesenjangan vertikal pusat-daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antardaerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah yang harus dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi belanja rutin dan belanja pembangunan”.⁷⁶

Pemberian bantuan dari pusat berupa DAU dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk membangun sejumlah sarana fasilitas publik dalam rangka pembangunan di daerahnya. Kenneth Davey menuturkan bahwa “bantuan (*grants*) yang diberikan pusat kepada daerah penggunaannya cenderung mengutamakan prasarana jalan, pengaliran limbah, irigasi, pengendalian banjir investasi langsung dalam program-program produksi”.⁷⁷

Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah daerah yang sangat penting karena jumlahnya yang sangat besar untuk dapat menjalankan pembangunan di daerahnya.

Menurut Kadjatmiko dalam Abdul Halim menerangkan bahwa “dalam rangka pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang direalisasikan pada pembangunan daerah yang didasarkan pada azas desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi serta bantuan dari pusat”.⁷⁸

Hal serupa pun dikemukakan oleh Tjip Ismail yang menyatakan bahwa “kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dibiayai melalui sumber PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain

⁷⁶ Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah: Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Cikal Sakti Grasindo, 2008) h.11

⁷⁷ Davey, *LogCit*, h.211

⁷⁸ Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2001) h. 194

penerimaan yang sah”.⁷⁹ Menurut Machfud Sidik dan perimbangan yaitu “komponen penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus”.⁸⁰

Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran investasi pemerintah atau pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran pemerintah untuk membiayai administrasi pemerintahan, sedangkan pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang akan menambah modal sosial masyarakat yaitu barang-barang modal yang akan digunakan oleh masyarakat seperti jalan-jalan, pelabuhan dan jaringan jalan kereta api.⁸¹

Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Yusrizal Ilyas bahwa

“Seluruh pendapatan daerah yang diperoleh baik dari daerahnya sendiri maupun transfer dan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan sebagainya akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah itu baik melalui pos belanja daerah maupun pengeluaran pembiayaan”.⁸²

Oleh karena itu dengan adanya kedua sumber pendanaan tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat melayani masyarakat dengan maksimal serta pembangunan didaerahnya dapat berjalan lebih baik lagi dari waktu ke waktu.

⁷⁹ Tjip Ismail, *OpCit*, h.185

⁸⁰ Machfud Sidik, *OpCit*, h. 56

⁸¹ Sadono Sukirno, *OpCit*, h.57

⁸² Yusrizal Ilyas, Laporan Evaluasi Belanja Modal Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, 2013, h. 7

Sehingga program otonomi daerah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dengan tujuan kemandirian daerah, mengatur serta mengurus kepentingan daerahnya tanpa tergantung dari pusat lambat laun dapat tercapai.

D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan deskripsi teoritis dan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah

1. Pendapatan Asli Daerah terdapat pengaruh terhadap belanja modal.
2. Dana Alokasi Umum terdapat pengaruh terhadap belanja modal.
3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama terdapat pengaruh terhadap belanja modal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas beberapa masalah yang telah peneliti rumuskan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat dan dapat diandalkan tentang: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih satu bulan pada bulan Maret 2015. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jln. DR. Wahidin No 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9 Jakarta Pusat 10710. Alasan peneliti memilih tempat ini karena data yang peneliti butuhkan ada di DJPK RI. Pertimbangan-pertimbangan dari segi waktu dan biaya juga menjadi salah satu alasan lain peneliti untuk memilih DJPK RI sebagai tempat penelitian yang dipilih.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Menurut Consuelo dalam Husein Umar:

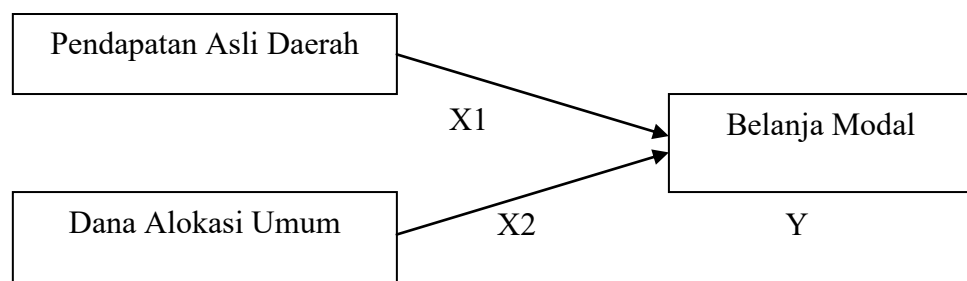
Survei digunakan untuk mengukur gejala-gejala yang ada tanpa menyelidiki kenapa gejala-gejala tersebut ada, sehingga tidak perlu memperhitungkan

hubungan antara variabel-variabel, karena hanya menggunakan data yang ada untuk pemecahan masalah daripada menguji hipotesis.⁸³

Penelitian ini dimulai dengan teknik kajian pustaka dan analisis laporan realisasi anggaran pemerintah daerah yang menjadi sampel penelitian. Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan variabel terikat (dependen) adalah Belanja Modal.

Gambar III.1

Konstelasi Hubungan Antar Variabel



Keterangan :

Variabel Bebas (X1) : Pendapatan Asli Daerah

Variabel Bebas (X2) : Dana Alokasi Umum

Variabel Terikat (Y) : Belanja Modal

—————> : Arah Hubungan

⁸³ Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 23

D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁸⁴

Populasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota dan sekaligus menjadi populasi terjangkau karena keseluruhan data merupakan berupa pendapatan asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal bersifat homogen.

Jumlah kabupaten/kota menyampaikan Laporan Realisasi APBD Tahun 2011 hingga 2013 kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebanyak 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dari Laporan Realisasi APBD tersebut diperoleh data mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal.

⁸⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), h. 49

2. Teknik Pengambilan Sampel

Berdasarkan jumlah populasi yang diambil sebanyak 35 kabupaten/kota, jumlah sample yang ditentukan menggunakan tabel Isaac Michael⁸⁵ dengan taraf kesalahan(*significant*)5% yaitu didapat sebanyak 32 kabupaten/kota yang akan dijadikan sample. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik *Probability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan(peluang) yang sama pada setiap anggota(unsur) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, salah satu teknik yang diambil yaitu *simple random sampling*.⁸⁶

Simple random sampling ialah teknik pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Hal ini dikarenakan data yang diteliti merupakan data yang bersifat homogen.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas Instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal. Instrumen penelitian untuk mengukur ketiga variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

⁸⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), h. 85

⁸⁶ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung:Alfabeta, 2009) h. 64

1. Pendapatan Asli Daerah (Variabel X1)

a. Definisi Konseptual

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang perolehannya didapat dari keseluruhan jumlah hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah

b. Definisi Operasional

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dipungut oleh daerah berdasarkan undang-undang yang perolehannya didapat dari keseluruhan jumlah hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Satuan penilaian pendapatan asli daerah dinilai menggunakan mata uang rupiah

2. Dana Alokasi Umum (Variabel X2)

a. Definisi Konseptual

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang perolehannya atas dasar celah fiskal dijumlah dengan alokasi dasar.

b. Definisi Operasional

Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang perolehannya atas dasar celah fiskal dijumlah dengan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal sedangkan alokasi dasar didapat berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Satuan penilaian dana alokasi umum dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah.

3. Belanja Modal (Variabel Y)

a. Definisi Konseptual

Belanja modal adalah belanja langsung pemerintah daerah yang digunakan untuk pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap dan perolehannya atas dasar jumlah belanja tanah, belanja peralatan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan serta memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi

b. Definisi Operasional

Belanja modal merupakan belanja yang digunakan oleh pemerintah daerah guna menambah aset tetap yang perolehannya atas dasar jumlah belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja

jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja aset lainnya. Satuan penilaian belanja modal dinilai menggunakan mata uang rupiah.

F. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang dikumpulkan sebelumnya akan di analisa menggunakan statistik deskriptif. Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda. Analisis linier berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Teknik analisa data penelitian ini menggunakan program SPSS.

Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linier berganda sebagai berikut :

1. Uji Persyaratan Analisis

1.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual terdistribusikan secara normal. Pada dasarnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan histogram dari residualnya. Pengambilan keputusannya sebagai berikut :

- 1) Jika data menyebar dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 atau 5% maka data residual terdistribusi dengan normal, begitupula sebaliknya.

1.2 Uji Linieritas

Menurut Pedhazur dalam manuskrip Wahyu Widhiarso strategi untuk memverifikasi hubungan linier dapat dilakukan dalam beberapa cara, misalnya melalui *bivariate plot*, *linearity test* dan *curva estimation* atau analisis residual. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji linieritas menggunakan grafik *scatterplot* residual. Analisis grafik *scatterplot* residual dengan menghubungkan antara nilai prediksi terstandar dengan nilai residu terstandar melalui grafik. Linieritas terpenuhi apabila pola tidak membentuk suatu pola tertentu.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan apabila model dari penelitian ini lolos dari asumsi klasik. Agara lolos dari asumsi klasik maka data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung

multikolonieritas, dan heteroskedastisitas. Sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik, yakni :

2.1 Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas. Uji ini memberitahukan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antarvariabel independen.

Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Bila nilai *tolerance* $> 0,1$ dan *VIF* < 10 maka dapat dikatakan tidak terdapat multikolinieritas dan sebaliknya

2.2 Uji Autokorelasi

Pengujian ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi berganda linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ sebelumnya. Autokorelasi muncul karena pengamatan yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Bila ditemukan masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan menjadi tidak layak untuk digunakan.

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin - Watson* (DW test). Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi didasarkan atas kriteria sebagai berikut :

- 1) Bila nilai d_w terletak antara batas atas (d_u) dan $(4-d_u)$ maka koefisien autokorelasi sama dengan 0 yang berarti tidak terjadi autokorelasi.
- 2) Bila nilai d_w lebih rendah dari batas bawah (d_l) maka koefisien autokorelasi lebih besar dari pada 0 yang berarti ada autokorelasi positif.
- 3) Bila nilai d_w lebih besar dari $(4-d_l)$ maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari pada 0 yang berarti ada autokorelasi negatif.
- 4) Bila nilai d_w negatif diantara batas bawah dan batas atas atau diantara $(4-d_l)$ dan $(4-d_u)$ maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser. Bila nilai signifikansi di atas tingkat kepercayaan yaitu 5% maka dapat disimpulkan model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas

3. Model Regresi

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk melihat pengaruh PAD dan DAU terhadap pengeluaran pemerintah yang berupa belanja modal.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresinya adalah

$$\hat{Y} = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_nX_n$$

Dimana :

\hat{Y} = Belanja Modal

α = konstanta

X_1 = PAD

X_2 = DAU

$b_1 b_2$ = koefisien regresi untuk masing-masing variabel X

4. Uji Hipotesis

Dalam melakukan uji hipotesis umumnya diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F dan koefisien determinasi.

1. Uji Statistik t

Uji t ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Untuk dapat mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Jika nilai t hitung > t tabel maka berarti t hitung tersebut signifikan artinya variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen dengan tingkat signifikansi sebesar 5%.

2. Uji Statistik F

Uji statistik F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas dimasukkan dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan karena dapat menerangkan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi berkisar $0 \leq R^2 \leq 1$. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen menjelaskan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Statistik deskriptif dalam penelitian digunakan dengan tujuan memberikan gambaran atau deskripsi mengenai data yang ada agar memudahkan orang lain membaca dan memahami maksud dari data tersebut. Berikut hasil output SPSS yang merupakan gambaran dari keseluruhan data tentang Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel IV.1

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BMD	32	89357.15	416189.73	180906.0481	72796.65304
PAD	32	81312.56	742357.95	139974.7513	115902.71127
DAU	32	315564.98	1044039.15	706491.7260	187522.38641
Valid N (listwise)	32				

Sumber: data diolah dengan menggunakan SPSS versi 16

Keterangan : dalam jutaan rupiah

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang didapat dari keseluruhan jumlah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut tabel frekuensi

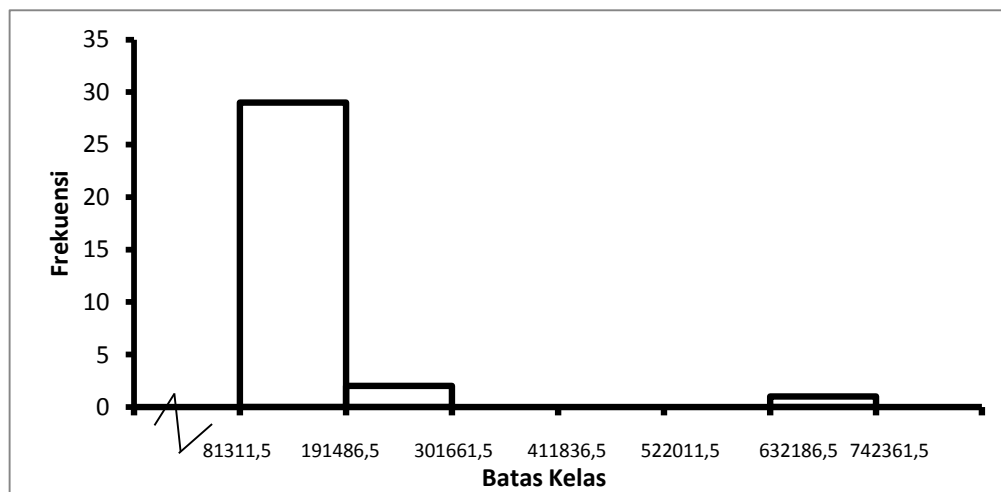
dan grafik batang jumlah Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel IV.2
Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Interval	Batas Bawah	Batas Atas	F	%
81.313– 191.486	81.311,5	191.486,5	29	90.6%
191.487 – 301.661	191.486,5	301.661,5	2	6.3%
301.662 – 411.836	301.661,5	411.836,5	0	0.0%
411.837 – 522.011	411.836,5	522.011,5	0	0.0%
522.012 – 632.186	522.011,5	632.186,5	0	0.0%
632.187 – 742.361	632.186,5	742.361,5	1	3.1%
Total			32	100%

Keterangan : Interval dalam jutaan rupiah

Gambar IV.1
Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan asli daerah (PAD) pada Provinsi Jawa Tengah menunjukkan masih

banyak daerah kabupaten/kota yang memiliki jumlah PAD yang kecil yaitu 81.312-191.485 (dalam juta rupiah) sebanyak 29 kabupaten/kota diantaranya yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Brebes, dll. (dapat dilihat pada lampiran halaman 93). Akan tetapi perbandingan rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun 2011-2013 mengalami kenaikan pendapatan asli daerah meskipun tidak signifikan yakni tahun 2011 sebesar 106.525, tahun 2012 sebesar 139.325, dan tahun 2013 sebesar 174.024 (jumlah dalam jutaan rupiah). Ini menunjukkan bahwa kinerja dari masing-masing pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah menunjukkan hasil yang cukup baik. Dan daerah yang memiliki jumlah PAD yang paling besar yaitu pada interval 632.187 – 742.361 adalah Kota Semarang sebesar 742.358 (dalam jutaan rupiah).

Dapat dilihat dari grafik tersebut pada interval 301.662 - 411.836, 411.837 – 522.011, 522.012 – 632.186 (dalam jutaan rupiah) memiliki frekuensi sama dengan nol dikarenakan tidak ada daerah yang memiliki jumlah pendapatan asli daerah (PAD) pada interval tersebut artinya hampir keseluruhan daerah kabupaten/kota masih memiliki PAD yang sangat sedikit dalam memenuhi kebutuhan daerahnya.

2. Dana Alokasi Umum

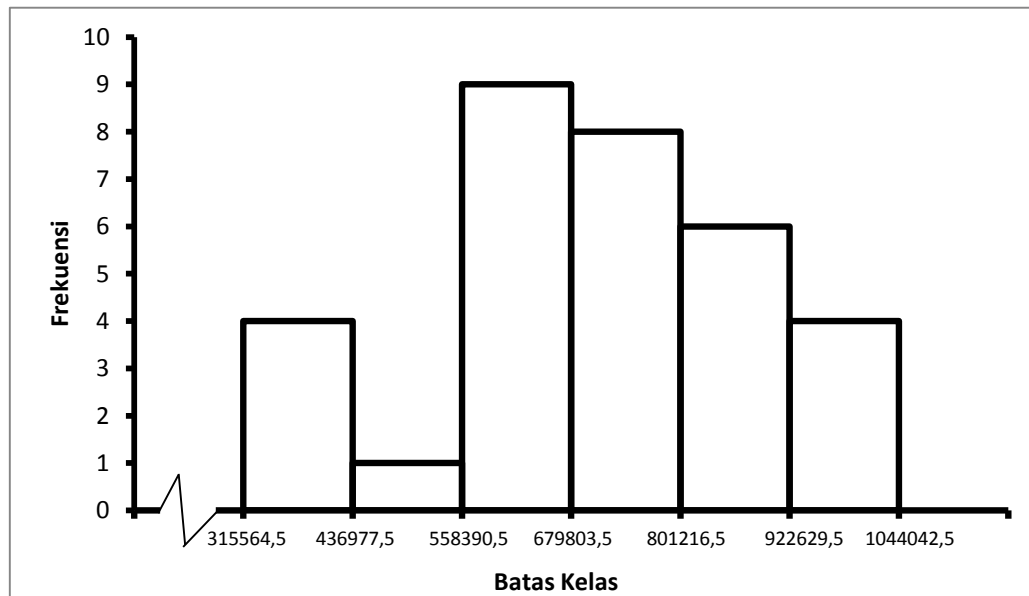
Dasar hukum pemberian bantuan dari pusat ke daerah berupa Dana Alokasi Umum yaitu UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana alokasi umum merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat guna membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pengeluarannya serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut tabel frekuensi dan grafik jumlah Dana Alokasi Umum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel IV.3
Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Interval	Batas Bawah	Batas Atas	F	%
315.565 – 436.977	315.564,5	436.977,5	4	12.5%
436.978 – 558.390	436.977,5	558.390,5	1	3.1%
558.391 – 679.803	558.390,5	679.803,5	9	28.1%
679.804 – 801.216	679.803,5	801.216,5	8	25.0%
801.217 – 922.629	801.216,5	922.629,5	6	18.8%
922.630 – 1.044.042	922.629,5	1.044.042,5	4	12.5%
Total			32	100%

Keterangan : Interval dalam jutaan rupiah

Gambar IV.2
Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah dana alokasi umum pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah menunjukkan banyaknya daerah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dalam jumlah besar dikarenakan karena potensi fiskal tiap-tiap daerah belum mampu tergali secara maksimal (dapat dilihat pada lampiran hal 94). Hal ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat ditujukan untuk membantu keuangan daerah dalam rangka desentralisasi fiskal.

3. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap atau inventaris yang

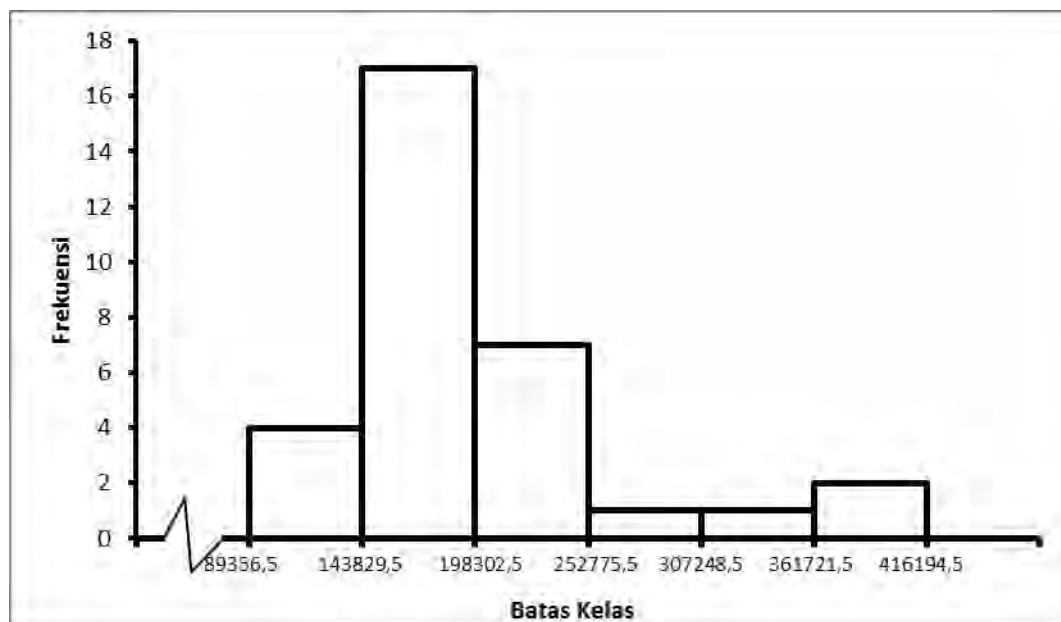
memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berikut tabel frekuensi dan grafik batang jumlah Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel IV.4
Belanja Modal
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Interval	Batas Bawah	Batas Atas	F	%
89.357 – 143.829	89.356.5	143.829.5	4	12.5%
143.830 – 198.302	143.829.5	198.302.5	17	53.1%
198.303 – 252.775	198.302.5	252.775.5	7	21.9%
252.776 – 307.248	252.775.5	307.248.5	1	3.1%
307.249 – 361.721	307.248.5	361.721.5	1	3.1%
361.722 – 416.194	361.721.5	416.194.5	2	6.3%
Total			32	100%

Keterangan: interval dalam jutaan rupiah

Gambar IV. 3
Belanja Modal
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah



Berdasarkan tabel frekuensi dan grafik batang diatas dapat diketahui bahwa banyak daerah yang masih sedikit sekali dalam mengalokasikan belanja modalnya yaitu hanya sekitar 89.357-143.289 (dalam juta). Daerah tersebut yaitu antara lain Kota Tegal, Kabupaten Magelang, Kota Salatiga, dll.(dapat dilihat dari lampiran halaman 95). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan anggarannya selain kepada belanja modal, misalnya lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai. Serta pemerintah daerah kurang serius dalam membangun infrastruktur guna menunjang perekonomian didaerahnya masing-masing.

B. Uji Persyaratan Analisis

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov*. Untuk menentukan hipotesis diterima atau ditolak dengan cara membandingkan *Asymp.sig. (2tailed)* dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. Jika *Asymp.sig. (2tailed)* > 0,05, maka dapat dikatakan data berdistribusi normal. Selain itu dalam penelitian ini untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal dengan menggunakan grafik *normal probability plot*. Normalitas terpenuhi apabila titik-titik(data) berkumpul mengikuti garis lurus. Berikut tabel hasil pengujian dengan menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov* beserta grafik *normal probability plot* dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 16.

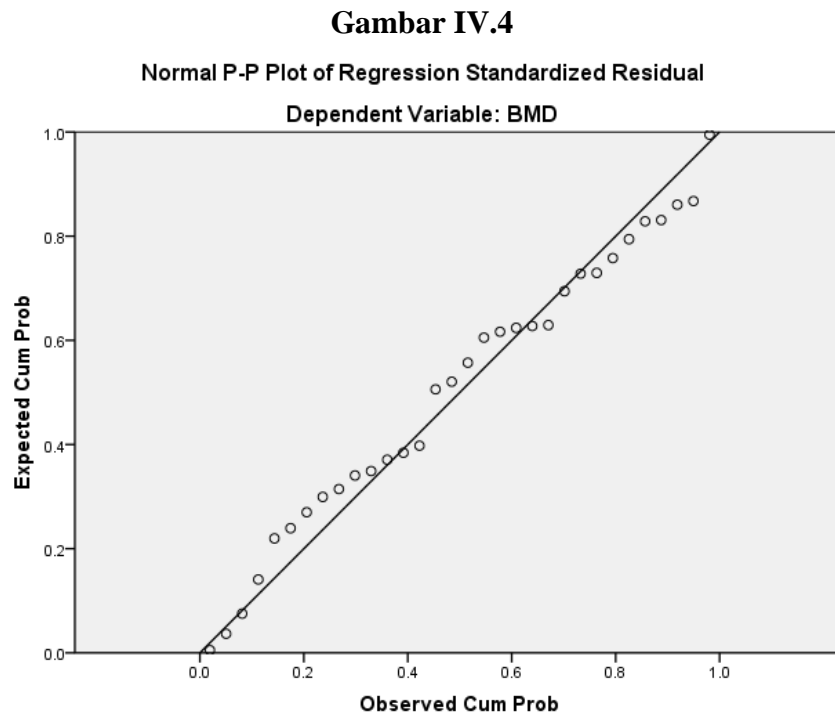
Tabel IV.5
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.25677983
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.093
	Negative	-.087
Kolmogorov-Smirnov Z		.528
Asymp. Sig. (2-tailed)		.943

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel diatas dengan melihat nilai uji *Kolmogrov-Smirnov* diketahui bahwa nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* > 0.05 yaitu $0.943 > 0.05$. Hal ini berarti bahwa data dari ketiga variable dalam penelitian ini berdistribusi normal.

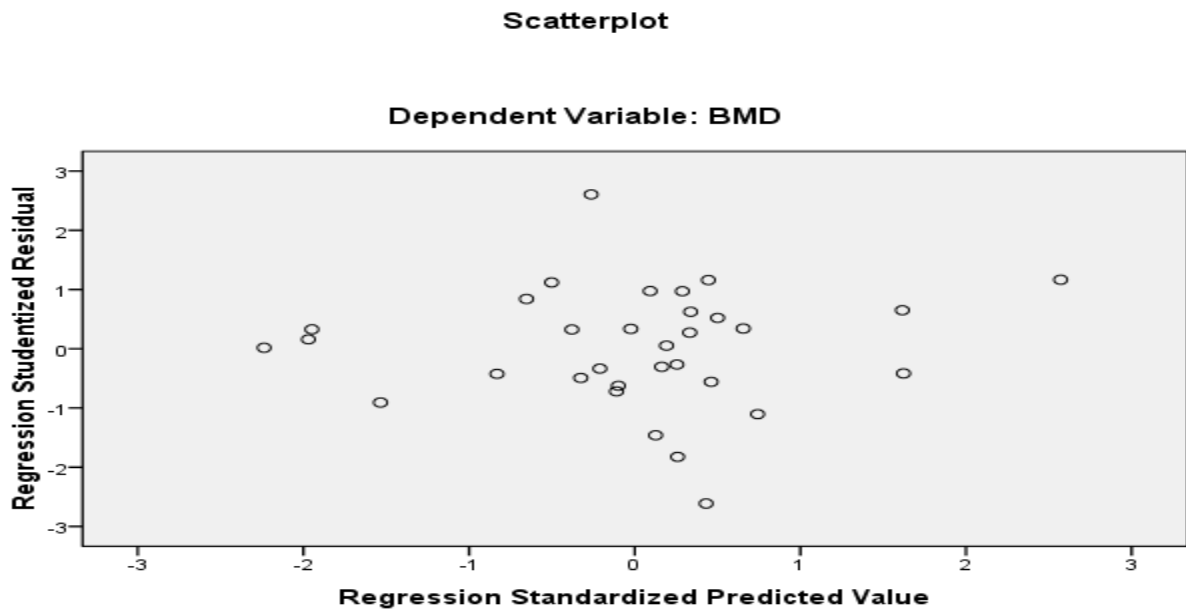


Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik mengikuti garis lurus diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa data memenuhi uji normalitas.

2. Uji Linieritas

Uji Linieritas dapat dibuktikan dengan menggunakan grafik *Scatter Plot Residual*. Berikut grafik *Scatter Plot* dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 16.

Gambar IV.5



Gambar tersebut merupakan gambaran plot residual terhadap nilai prediksi dari persamaan regresi yang didapat. Berdasarkan diagram pencar tersebut terlihat diagram tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan demikian asumsi linieritas terpenuhi.

C. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil penelitian yang dilakukan lolos uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, serta uji multikolinieritas.

1. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk melihat apakah model regresi ditemukan ada tidaknya korelasi antar variable bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat multikolinieritas. Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Bila nilai *tolerance* $> 0,1$ dan *VIF* < 10 maka dapat dikatakan tidak terdapat multikolinieritas dan begitu sebaliknya. Berikut uji multikolinieritas dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 16

Tabel IV.6

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.280	2.119		-.132	.896		
	PAD	.294	.122	.326	2.406	.023	.861	1.162
	DAU	.660	.163	.550	4.059	.000	.861	1.162

a. Dependent Variable: BMD

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* PAD dan DAU bernilai $0.861 > 0.10$ serta nilai VIF dari PAD dan DAU bernilai $1.162 < 10$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak terdapat multikolinieritas diantara variable-variabel bebas.

2. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ sebelumnya. Bila ditemukan masalah autokorelasi,

maka model regresi yang seharusnya signifikan menjadi tidak layak untuk digunakan. Kriteria agar lolos dari uji autokorelasi yaitu nilai $du < dw < 4-du$, du (batas atas), yang berarti tidak terjadi autokorelasi. Berikut uji autokorelasi dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 16.

Tabel IV.7

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.736 ^a	.542	.511	.26549	1.766

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BMD

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai $dw = 1.766$. Dari tabel *Durbin-Watson* diperoleh nilai $du = 1.5736$ dan nilai $4-du (1.5736) = 2.4264$ dengan kriteria $n = 32$ $k=2$. Jadi dapat disimpulkan bahwa $1.5736 < 1.766 < 2.4264$ yang berarti tidak terjadi autokorelasi pada masing-masing variabel bebas.

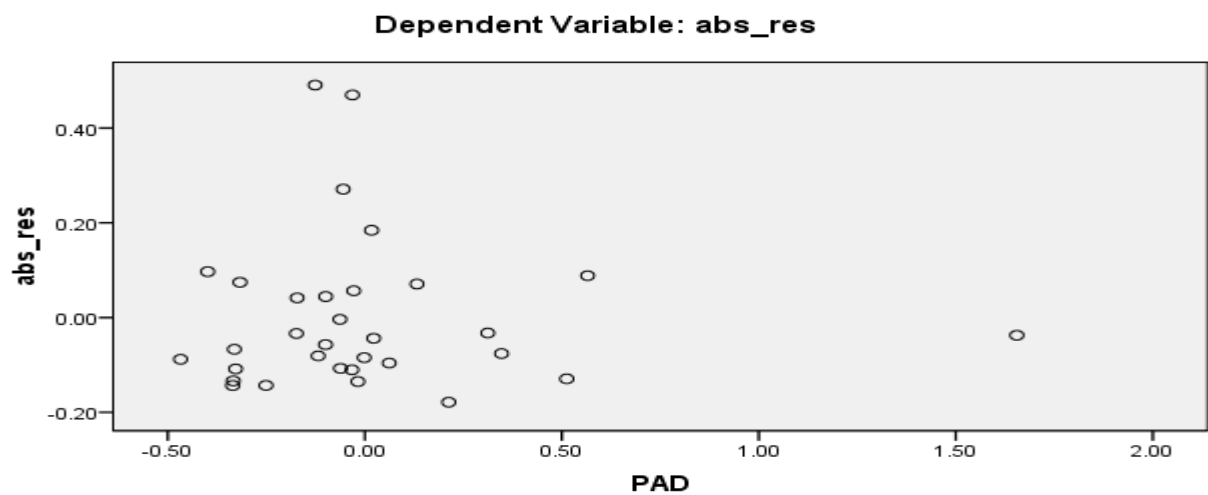
3. Uji Heterokedastisitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi atau untuk melihat penyebaran data. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heterokedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Berikut hasil output uji heterokedastisitas dengan menggunakan SPSS versi 16.

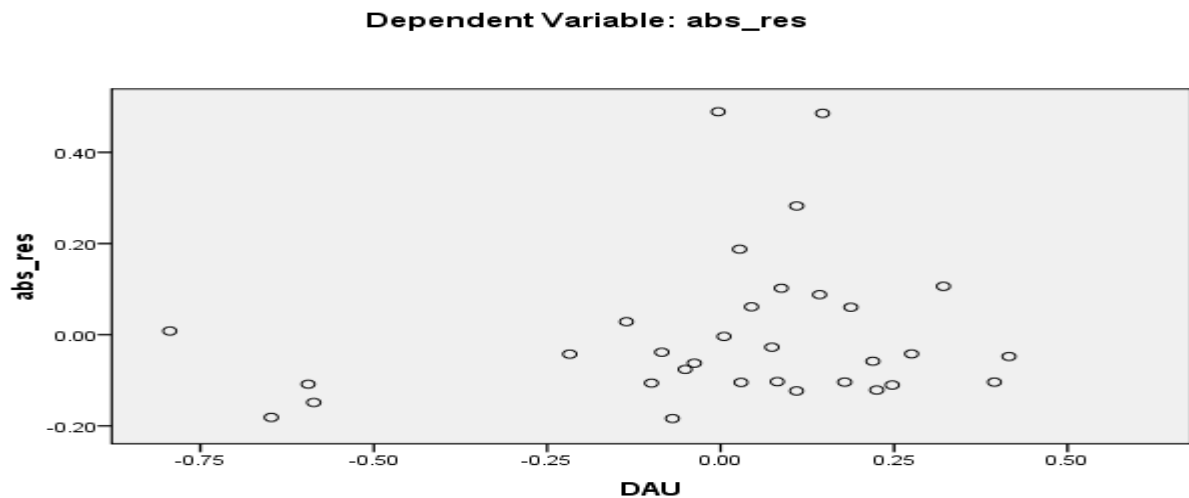
Tabel IV.8**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.142	1.337		-.855	.400
	PAD	-.011	.077	-.028	-.144	.886
	DAU	.109	.103	.209	1.064	.296

a. Dependent Variable: abs_res

Gambar IV.6

Gambar IV.7



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi PAD = $0.886 > 0.05$ begitu juga nilai signifikansi DAU = $0.296 > 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heterokedastisitas karena nilai signifikansi dari tiap-tiap variabel bebas diatas 0.05. Serta dilihat dari gambar *Scatterplot*, pada variabel PAD dan DAU masing-masing titik menyebar secara merata atau tidak homogen dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan hasil yang demikian terbukti bahwa persamaan regresi memenuhi asumsi non-heterokedastisitas.

4. Model Regresi

Model regresi dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh PAD, DAU terhadap alokasi belanja modal dalam APBD Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah. Model regresi dalam analisis regresi linier berganda yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Dimana: Y = Belanja Modal
 a = Konstanta
 X1 = PAD
 X2 = DAU
 b1b2 = Koefisien regresi

Dalam memperoleh model regresi berganda peneliti menggunakan aplikasi SPSS versi 16, yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel IV.9

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.280	2.119		-.132	.896		
PAD	.294	.122	.326	2.406	.023	.861	1.162
DAU	.660	.163	.550	4.059	.000	.861	1.162

a. Dependent Variable: BMD

Dari hasil output spss tersebut diperoleh model regresi sebagai berikut :

$$Y = -0.280 + 0.294X_1 + 0.660 X_2$$

Penjelasan dari persamaan regresi diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Nilai konstanta sebesar -0.280 menyatakan jika tidak ada peningkatan PAD dan DAU maka alokasi belanja modal hanya sebesar 0.280 pertahun.

b. Nilai koefisien PAD sebesar 0.294 menyatakan jika terjadi peningkatan sebesar 1% maka alokasi belanja modal akan mengalami peningkatan sebesar 0.294 dengan asumsi variabel bebas lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif

artinya terjadi hubungan yang positif antara PAD dengan Belanja Modal. Semakin besar jumlah PAD maka semakin meningkat pula jumlah Belanja Modal

c. Nilai koefisien DAU sebesar 0.660 menyatakan jika terjadi peningkatan sebesar 1% maka alokasi belanja modal akan mengalami peningkatan sebesar 0.660 dengan asumsi variabel bebas lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara DAU dengan Belanja Modal. Semakin besar jumlah DAU maka semakin meningkat pula jumlah Belanja Modal.

D. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk dapat mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Jika nilai t hitung $>$ t tabel maka berarti t hitung tersebut signifikan artinya variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen dengan tingkat signifikansi sebesar 0.05%. Berikut hasil output nilai uji t dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 16.

Tabel IV.10

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.280	2.119		-.132	.896
PAD	.294	.122	.326	2.406	.023
DAU	.660	.163	.550	4.059	.000

a. Dependent Variable: BMD

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk nilai uji t PAD = 2.406 dan DAU= 4.059. dan dari tabel t diketahui untuk t tabel = 2.045. Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Nilai t hitung PAD > t tabel = 2.406 > 2.045, dan nilai signifikan 0.023 < 0.05 yang artinya secara parsial variabel PAD (X_1) berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal (Y).
 - b) Nilai t hitung DAU > t tabel = 4.059 > 2.045, dan nilai signifikan 0.00 < 0.05 yang artinya secara parsial variabel DAU (X_2) berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal (Y)
- b. Uji Simultan (uji F)

Uji simultan atau uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen dimasukkan kedalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Caranya yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung > dari nilai F tabel maka semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Berikut hasil output uji F dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 16.

Tabel IV.11

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.421	2	1.211	17.176	.000 ^a
	Residual	2.044	29	.070		
	Total	4.465	31			

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BMD

Dari tabel diatas menunjukkan hasil uji $F = 17.176$ dan F tabel = 3.33, berarti F hitung $> F$ tabel = $17.176 > 3.33$ dengan nilai signifikan $0.00 < 0.05$ yang artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi berkisar $0 \leq R^2 \leq 1$. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen menjelaskan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Berikut output uji koefisien determinasi menggunakan aplikasi SPSS versi 16.

Tabel IV.12
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.736 ^a	.542	.511	.26549	1.766

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BMD

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2), nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.511 yang artinya bahwa presentasi sumbangan variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum) terhadap variabel dependen (Belanja Modal) sebesar 51.1% sedangkan sisanya sebesar 48.9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam metode penelitian ini.

E. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI. Data sekunder tersebut merupakan APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yaitu meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal.

Berdasarkan penelitian diatas hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa model persamaan regresi berganda adalah $Y = -0.280 + 0.294X_1 + 0.660X_2$ yang berarti nilai konstanta sebesar -0.280 menyatakan jika tidak ada peningkatan PAD dan DAU maka alokasi belanja modal hanya sebesar 0.280 pertahun. Nilai koefisien PAD sebesar 0.294 menyatakan jika terjadi peningkatan sebesar 1% maka alokasi belanja modal akan mengalami peningkatan sebesar 0.294 dengan asumsi variabel bebas lain nilainya tetap. Nilai koefisien DAU sebesar 0.660 menyatakan jika terjadi peningkatan sebesar 1% maka alokasi belanja modal akan mengalami peningkatan sebesar 0.660 dengan asumsi variabel bebas lain nilainya tetap. Kedua variabel tersebut memiliki koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh yang positif antara variabel independen (PAD dan DAU) terhadap variabel dependen (belanja modal)

Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pernyataan itu terlihat dari nilai t hitung PAD yang lebih besar dari t tabel yaitu $2.406 > 2.045$. Artinya Hipotesis pertama diterima. Hal ini disebabkan karena PAD merupakan sumber pendapatan yang dimiliki oleh daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya. Sehingga apabila jumlah PAD meningkat maka

akan meningkatkan pula belanja modalnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh In Indarti dan Sugiartiana yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi(PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum(DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Semarang Periode Tahun 2005-2009” terdapat perbedaan yaitu bahwa dalam penelitian beliau variabel PAD tidak berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal di Kota Semarang, beliau mengambil data tahun anggaran 2005-2009, sedangkan persamaannya yaitu DAU berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal.

Hubungan yang erat antara pemerintah dan masyarakat tercermin dari kemampuan serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang baik yaitu dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dialokasikan lewat belanja modal setiap tahunnya dengan sumber utama keuangan daerah yaitu pendapatan asli daerah(PAD).

Selain itu Dana Alokasi Umum juga memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pernyataan itu terlihat dari nilai t hitung DAU yang lebih besar dari t tabel yaitu $4.059 > 2.045$. Artinya hipotesis kedua diterima. Hal ini dikarenakan masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam membantu kebutuhan keuangan daerah dalam rangka pemerataan pendapatan. Hal yang sama juga telah dikemukakan oleh Adi dan Harianto dalam jurnal Septaningsih yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I. Yogyakarta”,

memperoleh temuan empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Septaningsih yaitu dalam pengujian parsial variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan perbedaannya yaitu untuk variabel DAU untuk uji parsial pada penelitian Septaningsih hasilnya berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Setelah dapat diketahui bahwa masing-masing variabel PAD dan DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial. Maka Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pernyataan itu dapat dilihat dari nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel yaitu sebesar $17.176 > 3.33$. Artinya hipotesis ketiga diterima. Hal ini juga sejalan dengan apa yang telah lebih dahulu diteliti oleh Abdullah dan Halim (2003) dalam jurnal Nugraeni yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Prediksi Belanja Daerah”, mereka menemukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu belum dapat menjelaskan tentang alokasi penggunaan anggaran yang manakah digunakan untuk belanja modal serta jenis belanja modal yang manakah yang lebih banyak pengalokasian anggaran belanjanya.

Nilai Koefisien determinasi (R^2) yang hanya sebesar 0.511 . Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat hanya sebesar 51.1% sedangkan sisanya 48.9% masih dipengaruhi oleh variabel

lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) diantaranya Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, Pinjaman Daerah serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel belanja modal. Hal itu diketahui dari nilai t hitung PAD $2.406 > t$ tabel 2.045 dengan nilai signifikan sebesar 0.023 dibawah 0.05 serta memiliki nilai koefisien yang positif yakni 0.294 yang artinya bahwa variabel PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel belanja modal daerah. Jadi semakin besar jumlah PAD maka semakin besar pula alokasi untuk belanja modal daerah.

2. Bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel belanja modal. Hal itu diketahui dari nilai t hitung DAU $4.059 > t$ tabel 2.045 dengan nilai signifikan sebesar 0.000 dibawah 0.005 serta memiliki nilai koefisien yang positif yakni 0.660 yang artinya bahwa variabel DAU memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel belanja modal daerah. Jadi semakin besar jumlah DAU maka semakin besar pula alokasi untuk belanja modal daerah.

3. Bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal itu diketahui dari uji F didapat nilai F hitung sebesar $17.176 > F$ tabel 3.33 dengan nilai signifikan sebesar 0.000 dibawah 0.05 . Dengan kata lain, variabel PAD dan DAU secara

bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel belanja modal daerah.

B. Implikasi

1. Dari hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal membawa dampak terhadap pengambilan keputusan dalam mengeluarkan anggaran daerah. Ketika terjadi peningkatan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum maka akan meningkatkan pula belanja modal.
2. Hubungan positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal mengisyaratkan bahwa pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan asli daerah yang lain akan berpengaruh terhadap belanja modal dan akan terjadi kemandirian dikabupaten tersebut untuk mendapatkan pendapatannya sendiri. Untuk itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah agar bisa menjadi daerah yang tidak tergantung terhadap pemerintah pusat.
3. Dana alokasi umum yang mengalir kedaerah bertujuan untuk meratakan keuangan antar daerah. Dana transfer dari pusat dalam pengalokasiannya sudah baik.

C. Saran

1. Pendapatan asli daerah Jawa Tengah masih dinyatakan rendah maka dari itu disarankan untuk menggali pendapatan asli daerah. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu adanya penentuan tingkat

pajak yang sesuai dengan tujuan kebijakan pengeluaran (belanja) pemerintah daerah. Meningkatkan tingkat pajak bisa dengan menambah wajib pajak yang tidak atau belum membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan.

2. Dana Alokasi umum Jawa Tengah yang mengalami kenaikan agar lebih memperhatikan kebutuhan fiskal daerahnya supaya tidak terjadi celah fiskal dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga tidak terjadi ketimpangan secara horizontal.
3. Disarankan bagi peneliti lain yang akan meneliti lebih dalam mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal untuk meneliti tempat yang lebih luas cakupannya tidak hanya cakupan untuk satu provinsi saja.
4. Lebih terperinci penggunaan alokasi anggaran pendapatan yang mana digunakan untuk belanja modal. Serta jenis belanja modal yang manakah yang lebih banyak pengalokasian anggaran belanjanya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abimanyu, Anggito dan Andie Megantara, **Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, Dan Implementasi**, Jakarta: Kompas, 2009.
- Adisasmita, Raharjo. **Pembiayaan Pembangunan Daerah**, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Afiah, Nunuy Nur. **Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Arif, Bachtiar., dkk. **Akuntansi Pemerintahan**, Jakarta: Akademia, 2009
- Bastian, Indra. **Sistem Akuntansi Sektor Publik**, Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Bastian, Indra. **Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Di Indonesia**, Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Baswir, Revrison d. **Akuntansi Pemerintahan Indonesia**, Yogyakarta : BPFY Yogyakarta, 1993
- Brotodiharjo, Santoso. **Ilmu Hukum Pajak**, Bandung: Refika Aditama, 1998
- Davey, K.J.,. **Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga**, Jakarta: UI-Press, 1988
- Djaenuri, M.Aries. **Hubungan Keuangan Pusat-Daerah: Elemen-elemen penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah**, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Hadi, Samsul. **Jakarta Incorporation Paradigma Baru BUMD**, Surabaya: ACC Grafika Raya, 2007
- Halim, Abdul. **Akuntansi Keuangan Daerah**, Jakarta: Salemba Empat, 2007
- . **Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah**, Jakarta: Salemba Empat, 2002
- . **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- . **Manajemen Keuangan Daerah**, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2001

- Ilyas, Yusrizal. **Laporan Evaluasi Belanja Modal Daerah**, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, 2013
- Ismail, Tjip. **Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia**, Jakarta: Yellow Printing, 2007
- Joedo, Hari S. Malang. **Reinventing BUMD:Kunci Sukses Mengembangkan BUMD Produktif dan Profesional**, Jakarta:PT Gramedia,2006
- John Hy, Ronald. and William L.Waugh, JR. *State and Local Tax Policies. A Comparatives Handbook*, London , Connecticut: Greenwood Press, Wesport,1995
- Kaho, Josef Riwu. **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Mahmudi, **Manajemen Keuangan Daerah**, Jakarta:Erlangga,2010
- Manan, Bagir. **Beberapa Masalah Hukum Tata Negara**, Bandung: Alumni,1997.
- Mardiasmo, **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**, Yogyakarta: Andi,2002.
- Marsyahrul, Tony. **Pengantar Perpajakan**, Jakarta: Grasindo,2004
- Meliala, Tulis S. **Akuntansi Sektor Publik** Jakarta: Semesta Media,2007
- Mikesell, **Fiscal Administration Analysis and Application For the Public Sector**, Illinois: The Dorsey Press Homewood, 1982
- Napitupulu, Paimin. **Pelayanan Publik&Customer Satisfaction:Prinsip-Prinsip Dasar Agar Pelayanan Publik Lebih Berorientasi Pada Kepuasan dan Kepentingan Masyarakat**, Bandung:Alumni,2012
- Nurcholis, Hanif. **Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah**, Jakarta: Grasindo, 2005
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2005, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2007.
- Rochmad, Soemitro.**Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak**, Jakarta:Eresco,1979
- Siahaan, Marihot P. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

- Sidik, Machfud. **Studi Empiris Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Di Era Otonomi Daerah**, UI:Kuliah Perdana-Program Pasca Sarjana Fisip,2001
- , **Bunga Rampai Desentralsasi Fiskal**, Jakarta:Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah DepKeu RI, 2004
- Sidik, Machfud. Raksaka Mahi, Robert,dkk., **Dana Alokasi Umum:Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah**, Jakarta:Kompas,2002
- Slamet Munawir,et al., **Perpajakan untuk SLTA**, Yogyakarta: BPFE UGM, 1990
- Soemitro, Rochmat. **Pajak dan Pembangunan**, Bandung: Eresco,1982
- Sudjana, **Metode Statistika**, Bandung: Tarsito, 2002
- Sugianto, **Pajak dan Retribusi Daerah:Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah**, Jakarta:Cikal Sakti Grasindo,2008
- Sugiyono, **Memahami Penelitian Kualitatif**, Bandung: CV. Alfabeta, 2009
- , **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009
- , **Statistika Untuk Penelitian**, Bandung:Alfabeta, 2009
- Sukirno, Sadono. **Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah**, Jakarta:LPFE UI,1985
- Suparmoko,M. **Ekonomi Publik:Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah**, Yogyakarta:ANDI Yogyakarta,2002
- Tangkilisan, Hessel Nogi. **Manajemen Publik**, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Umar, Husein. **Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004
- Widjaja, HAW. **Otonomi Daerah dan Daerah Otonom**, Jakarta:Raja Grafindo Persada,2009
- Yani, Ahmad. **Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia**, Jakarta: Raja Grafindo,2008

JURNAL

Gregorius N. Masdjojo dan Sukartono, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006-2008", Jurnal TEMA vol.6 Edisi 1. Maret 2009, h. 32-50

Indarti, Iin. dan Sugiartiana "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Semarang periode 2005-2009", Jurnal Fokus Ekonomi Vol.7 No.2 Desember 2012, h. 1-15

Pudjiharjo, M., Ghozali Maski, Moh. Khusaini, "The Impact of Fiscal Decentralization on Local Economic Development In East Java", Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Vol 13, Jul-Aug 2013. Hal 01-07

Nugraeni, "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia", Akmenika UPY, Vol.8 Oktober 2011, h.96-115

Suhardjanto, Djoko, Eni Jufriyah, Sri Hartoko, "The Influence Fiscal Decentralization on Public Expenditure in Indonesia", Jurnal Siasat Bisnis Vol.13 No.3, Dec 2009, hal 233-252

Sumarni, Septaningsih. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta", Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol.4, April 2009. Hal 55-66

Surat Kabar

Riza Fathoni, "Dana Pembangunan di Bank", Kompas, 08 Oktober 2012

Internet

- Badrudin ,Rudi. Efektivitas Anggaran Pembangunan.2013.
<http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/1811/efektivitas-anggaran-pembangunan.kr>.(diakses pada 26 November 2014)
- Inawan, Runa. 2014, Konsep Belanja Modal Pada Sistem Akuntansi Pemerintahan,
<http://blog.sivitas.lipi.go.id/blog.cgi?cetakisiblog&1262743373&&1036006250&&1388155399&runa005&1281060205> (diakses pada 10 September 2014)
- Jibi, Anggaran Negara : pemerintah dorong belanja modal daerah.2012.
<http://www.bisnis-kti.com/index.php/2012/04/anggaran-negara-pemerintah-dorong-daerah-belanjakan-modal-lebih-besar>.(diakses pada 10 Desember 2012)
- Kuntadi, Wapres Kritik Pemda Soal DAU.2012.
<http://m.sindonews.com/read/2012//10/04/22/676813/wapres-kritik-pemda-soal-dau>. (diakses pada 11 Desember 2012)
- Mardiana, Erna. Pemkot Bandung Dinilai Gagal Kelola APBD dan Tata Ruang.2012.
<http://m.detik.com/bandung/read/2012/07/17/165739/1967571/486/>.(diakses pada 30 November 2012)
- Ramadhani, Silvia. Ini Provinsi dan Kabupaten dengan Alokasi Dana Triliunan.2014.
<http://m.okezone.com/read/2014/02/20/934953/ini-provinsi-dan-kabupaten-dengan-alokasi-dana-triliunan>.(diakses pada 19 November 2014)
- Rastika, Icha. 2012, 24 Kepala Daerah Terjerat Korupsi.2012.
<http://m.kompas.com/news/read/2012/12/28/18372358/2012..24.kepaladaerah.terjerat.korupsi--nasional>.(diakses pada 29 Desember 2012)
- Redaksi Metro Bali, Bappenas:Optimalkan Belanja Modal Tumbuhkan Ekonomi Daerah.2014. <http://metro.bali.com/2014/08/14/bappenas-optimalkan-belanja-modal-tumbuhkan-ekonomi-daerah/>. (diakses pada 26 November 2014)
- Sudibyo, Anton. PAD Jateng Lebih Rendah Dari Potensi.2014.
<http://berita.suamerdeka.com/pad-jateng-lebih-rendah-dari-potensi/>.(diakses pada 19 November 2014)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp/Fax.: Rektor (021) 4893854, PR I: 4895130, PR II: 4893918, PR III: 4892926, PR IV: 4893982,
BAUK: 4750930, BAAK: 4759081, BAPSI: 4752180
Bag. UHTP: Telp. 4893726, Bag. Keuangan: 4892414, Bag. Kepegawaian: 4890536, HUMAS: 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 0462/UN39.12/KM/2015

4 Februari 2015

Lamp

Hal : Permohonan Izin Penelitian Untuk Skripsi

Yth Direktur Evaluasi Pendanaan
dan Informasi Keuangan Daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan RI

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Achmad Syaihu
Nomor Registrasi : 8155087995
No. Telp/HP : 083895976655
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Untuk Mengadakan : Penelitian Untuk Skripsi

Di : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan RI,
Jl. Dr. Wahidin, No.1, Gedung Radius Prawiro Lt.8,
Jakarta Pusat 10710

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Skripsi. Skripsi tersebut dengan judul :

"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011-2013"

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan,



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Kaprog / Jurusan Ekonomi dan Administrasi

Lampiran II



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH
SUBDIREKTORAT DATA KEUANGAN DAERAH

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 8, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
 TELEPON (021) 3452590, FAKSIMILE (021) 3505103, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S-4/ PK.5.4/2015
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Izin Penelitian Untuk Skripsi

4 Maret 2015

Yth. Kepala Biro Administrasi Akademik
 dan Kemahasiswaan
 Universitas Negeri Jakarta
 Jalan Rawamangun Muka
 Jakarta 13220

Sehubungan dengan surat yang diajukan Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta Nomor 0462/UN39.12/KM/2015 tanggal 4 Februari 2015 tentang Permohonan Izin Penelitian Untuk Skripsi, dapat kami sampaikan bahwa kepada Sdr. Achmad Syaihu (Nomor Registrasi: 8155087995) mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, secara prinsip dapat diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (c.q. Subdirektorat Data Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah) untuk kepentingan penyusunan skripsi.

Adapun data dimaksud juga dapat diperoleh melalui website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan alamat <http://www.djpk.depkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/setelah-ta-2006>.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kasubdit Data Keuangan Daerah
 Kasi Data Keuangan Daerah IV



Dwi Setiyowati
 NIP. 19720102 199903 2 001

LAMPIRAN III**Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011-2013****(dalam juta rupiah)**

Kabupaten kota Di Jawa Tengah	2011	2012	2013	Rata-rata
Kab banjarnegara	71,107	94,271	98,975	88,118
kab banyumas	191,900	242,107	308,349	247,452
kab batang	60,155	84,720	143,503	96,126
kab blora	67,022	81,987	95,193	81,401
kab boyolali	96,738	127,725	160,752	128,405
kab brebes	78,276	101,807	133,836	104,640
kab cilacap	172,327	196,673	278,508	215,836
kab demak	74,559	105,363	138,214	106,045
kab grobogan	87,912	105,463	143,586	112,321
kab jebara	103,642	129,077	133,778	122,166
kab karanganyar	104,081	116,707	161,716	127,501
kab kebumen	73,513	102,374	131,482	102,456
kab kendal	93,290	120,162	136,030	116,494
kab klaten	72,291	84,756	115,442	90,830
kab kudus	108,459	121,017	144,995	124,824
kab magelang	90,463	123,723	173,254	129,146
kab pati	134,476	163,734	169,127	155,779
kab pekalongan	81,363	114,793	147,687	114,615
kab pемalang	79,678	97,951	136,363	104,664
kab purbalingga	94,946	103,756	122,859	107,187
kab purworejo	88,942	98,262	127,566	104,923
kab rembang	73,932	103,305	126,808	101,348
kab semarang	133,199	156,104	215,680	168,328
kab sragen	94,519	127,696	146,722	122,979
kab sukoharjo	96,167	164,954	192,972	151,364
kab tegal	90,133	118,742	156,245	121,706
kab temanggung	63,343	78,515	102,080	81,313
kab wonogiri	77,142	100,037	111,593	96,257
kab wonosobo	67,399	82,335	108,730	86,155
Kota magelang	63,558	91,315	107,740	87,538
Kota pekalongan	63,345	91,206	114,252	89,601
kota salatiga	60,611	77,799	106,100	81,503
kota semarang	521,538	779,617	925,919	742,358
kota surakarta	181,097	231,672	298,401	237,057
kota tegal	117,244	156,663	176,377	150,095
Rata-rata	106.525	139.325	174.024	

LAMPIRAN IV**Data Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011-2013****(dalam juta rupiah)**

Kabupaten kota Di Jawa Tengah	2011	2012	2013	Rata-rata
Kab banjarnegara	562,288	681,396	763,427	669,037
kab banyumas	835,610	991,945	1,127,940	985,165
kab batang	472,131	577,238	641,664	563,677
kab blora	547,170	673,181	753,830	658,060
kab boyolali	641,483	780,302	871,686	764,490
kab brebes	800,183	981,051	1,099,000	960,078
kab cilacap	876,994	1,057,808	1,197,315	1,044,039
kab demak	544,460	658,971	737,912	647,114
kab grobogan	668,995	812,991	906,666	796,218
kab jepara	592,164	712,740	814,380	706,428
kab karanganyar	577,563	720,919	810,217	702,899
kab kebumen	731,981	906,222	1,021,871	886,691
kab Kendal	569,224	702,708	788,134	686,689
kab klaten	793,293	967,285	1,066,318	942,299
kab kudus	488,820	637,615	719,407	615,281
kab magelang	668,922	816,733	899,528	795,061
kab pati	692,179	850,377	960,479	834,345
kab pekalongan	553,660	678,714	768,500	666,958
kab pemalang	672,430	827,163	931,427	810,340
kab purbalingga	521,932	640,265	719,185	627,128
kab purworejo	585,851	711,742	793,905	697,166
kab rembang	468,745	570,455	640,273	559,824
kab semarang	567,856	691,272	778,605	679,244
kab sragen	618,443	778,668	869,156	755,422
kab sukoharjo	564,840	680,235	763,463	669,513
kab tegal	703,779	860,568	957,576	840,641
kab temanggung	482,938	584,158	651,172	572,756
kab wonogiri	682,033	828,480	917,477	809,330
kab wonosobo	485,766	597,858	665,548	583,058
Kota magelang	292,580	348,498	385,859	342,313
Kota pekalongan	293,530	347,390	384,489	341,803
kota salatiga	262,653	325,710	358,332	315,565
kota semarang	715,701	936,866	1,054,003	902,190
kota Surakarta	473,889	595,223	659,647	576,253
kota tegal	265,483	334,819	370,643	323,648
Rata-rata	579.302	710.502	795.687	

LAMPIRAN V

**Data Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011-2013
(dalam juta)**

Kabupaten kota Di Jawa Tengah	2011	2012	2013	Rata-rata
Kab banjarnegara	160,076	158,301	175,918	164,765
kab banyumas	169,316	234,952	313,189	239,152
kab batang	88,042	133,480	148,223	123,248
kab blora	105,829	219,108	260,455	195,131
kab boyolali	138,437	207,759	249,112	198,436
kab brebes	142,729	192,983	325,841	220,518
kab cilacap	203,565	308,872	421,187	311,208
kab demak	234,922	339,018	352,310	308,750
kab grobogan	161,322	190,075	353,074	234,824
kab jepara	212,928	297,197	158,799	222,975
kab karanganyar	86,229	122,761	148,479	119,156
kab kebumen	187,138	295,209	286,959	256,435
kab kendal	199,990	192,582	155,399	182,657
kab klaten	130,546	182,607	186,884	166,679
kab kudus	125,457	178,143	132,972	145,524
kab magelang	84,900	95,351	108,604	96,285
kab pati	89,665	174,150	203,474	155,763
kab pekalongan	97,246	124,487	184,320	135,351
kab pемalang	128,206	128,367	249,976	168,850
kab purbalingga	166,386	126,673	112,767	135,275
kab purworejo	87,865	149,105	180,854	139,275
kab rembang	187,993	200,204	135,448	174,548
kab semarang	160,539	264,417	227,584	217,513
kab sragen	70,837	125,506	141,264	112,536
kab sukoharjo	97,154	233,724	209,691	180,190
kab tegal	145,856	303,315	215,975	221,715
kab temanggung	93,304	162,080	103,806	119,730
kab wonogiri	111,320	185,814	192,049	163,061
kab wonosobo	119,761	189,467	138,195	149,141
Kota magelang	81,027	79,136	142,589	100,917
Kota pekalongan	82,344	103,506	131,316	105,722
kota salatiga	77,409	124,905	69,204	90,506
kota semarang	305,704	351,854	591,011	416,190
kota surakarta	128,443	186,150	244,976	186,523
kota tegal	93,963	73,304	100,804	89,357
Rata-rata	135.899	189.559	210.077	

LAMPIRAN VI HASIL PERHITUNGAN

1. Perhitungan Nilai Batas Atas dan Batas Bawah Pendapatan Asli Daerah

a. Menentukan rentang

$$\begin{aligned} \text{Rentang} &= \text{Data terbesar} - \text{data terkecil} \\ &= 742.358 - 81.313 \\ &= 661.045 \end{aligned}$$

b. Banyak interval kelas (aturan Sturges)

$$K = 1 + (3.3) \text{ Log } n$$

$$K = 1 + (3.3) \text{ Log } 32$$

$$K = 1 + (3.3) 1.51$$

$$K = 1 + 4.97$$

$$K = 5.97 \text{ dibulatkan menjadi } 6 \text{ kelas}$$

c. Panjang kelas interval

$$\begin{aligned} P &= \frac{\text{Rentang}}{\text{Kelas}} \\ &= \frac{661.045}{6} = 110.174 \end{aligned}$$

2. Perhitungan Nilai Batas Atas dan Batas Bawah Dana Alokasi Umum

a. Menentukan rentang

$$\begin{aligned} \text{Rentang} &= \text{Data terbesar} - \text{data terkecil} \\ &= 1.044.039 - 315.565 \\ &= 728.474 \end{aligned}$$

b. Banyak interval kelas (aturan Sturges)

$$K = 1 + (3.3) \text{ Log } n$$

$$K = 1 + (3.3) \text{ Log } 32$$

$$K = 1 + (3.3) 1.51$$

$$K = 1 + 4.97$$

$$K = 5.97 \text{ dibulatkan menjadi } 6 \text{ kelas}$$

c. Panjang kelas interval

$$\begin{aligned} P &= \frac{\text{Rentang}}{\text{Kelas}} \\ &= \frac{728.474}{6} = 121.412 \end{aligned}$$

3. Perhitungan Nilai Batas Atas dan Batas Bawah Belanja Modal

a. Menentukan rentang

$$\begin{aligned} \text{Rentang} &= \text{Data terbesar} - \text{data terkecil} \\ &= 416.190 - 89.357 \\ &= 326.833 \end{aligned}$$

- b. Banyak interval kelas (aturan Sturges)
 $K = 1 + (3.3) \text{ Log } n$
 $K = 1 + (3.3) \text{ Log } 32$
 $K = 1 + (3.3) 1.51$
 $K = 1 + 4.97$
 $K = 5.97$ dibulatkan menjadi 6 kelas
- c. Panjang kelas interval
 $P = \frac{\text{Rentang}}{\text{Kelas}}$
 $= \frac{326.833}{6} = 54.472$

4. Analisis Data

1. Uji Persyaratan Analisis

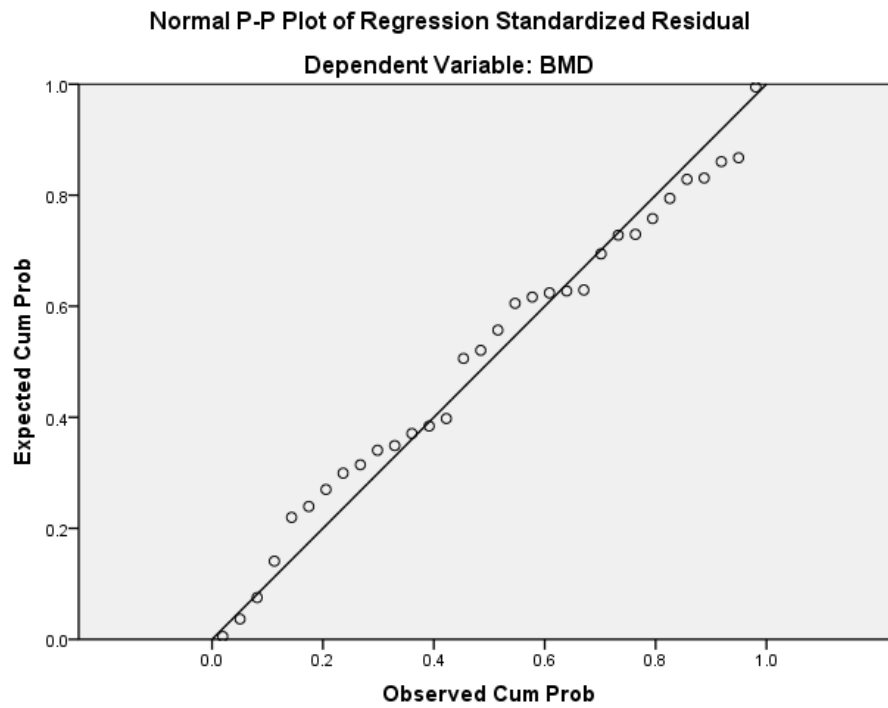
a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.25677983
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.093
	Negative	-.087
Kolmogorov-Smirnov Z		.528
Asymp. Sig. (2-tailed)		.943

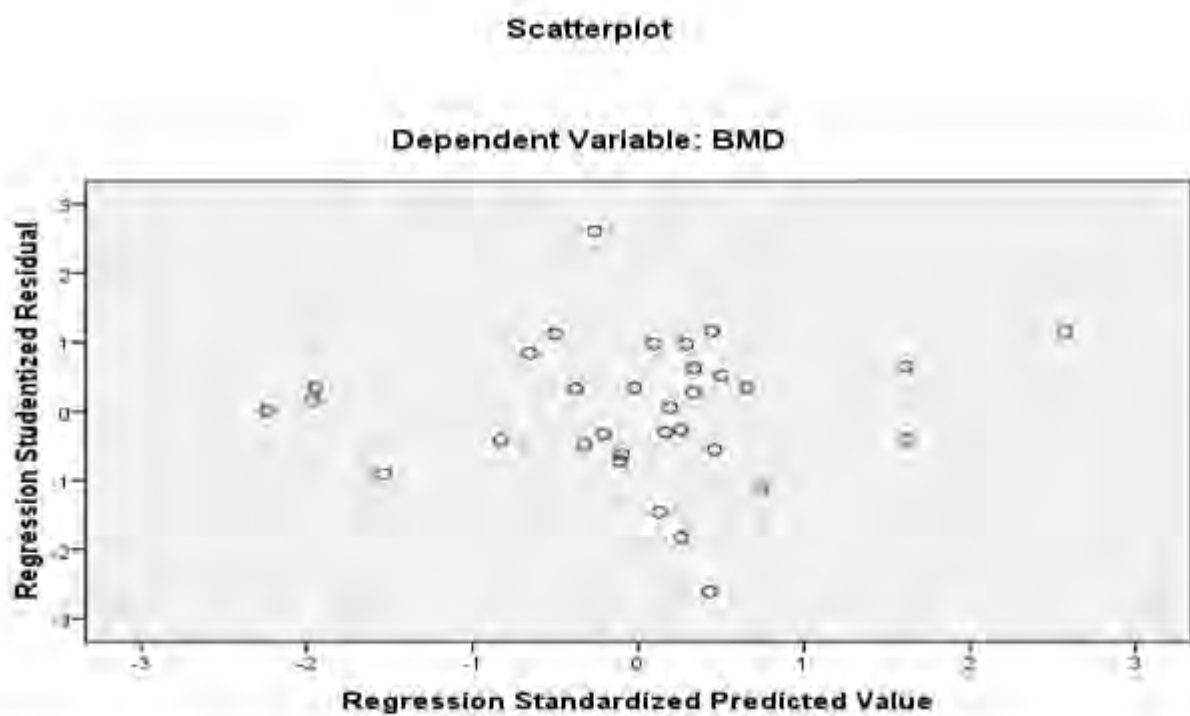
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



b. Uji Linieritas

Pengujian ini dapat dilihat menggunakan grafik *Scatter Plot*



2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.280	2.119		-.132	.896		
PAD	.294	.122	.326	2.406	.023	.861	1.162
DAU	.660	.163	.550	4.059	.000	.861	1.162

a. Dependent Variable: BMD

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* PAD dan DAU bernilai $0.861 > 0.01$ serta nilai VIF dari PAD dan DAU bernilai $1.162 < 10$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak terdapat multikolinieritas diantara variable-variabel bebas.

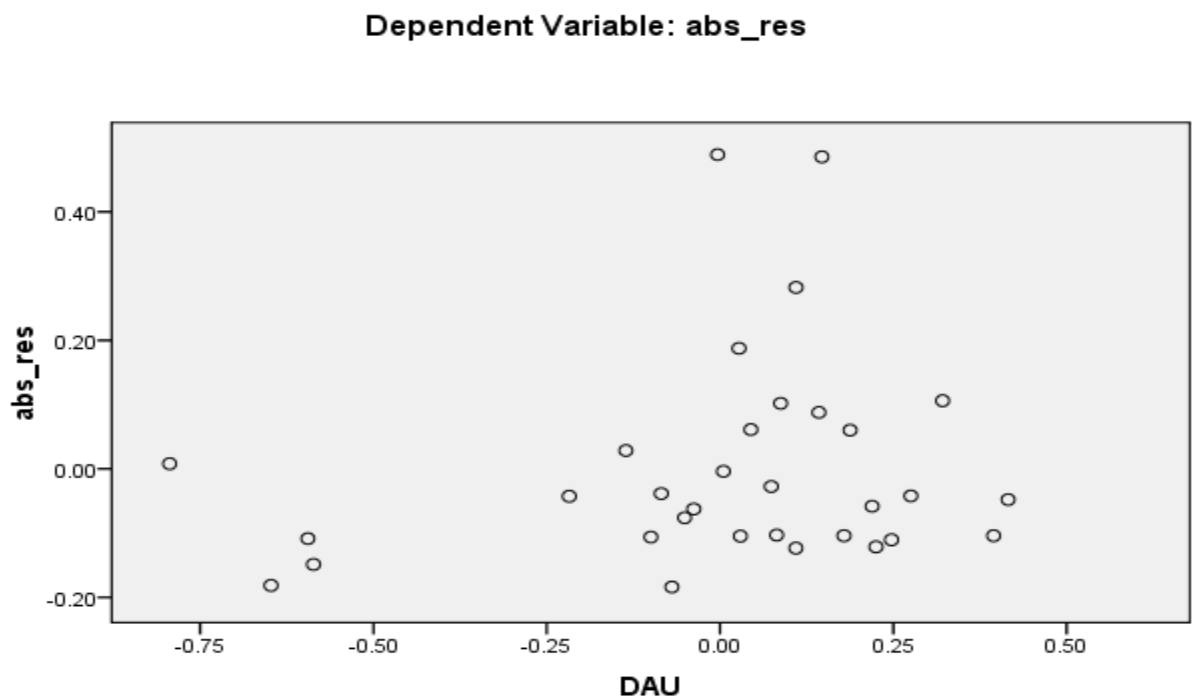
b. Uji Heterokedastisitas

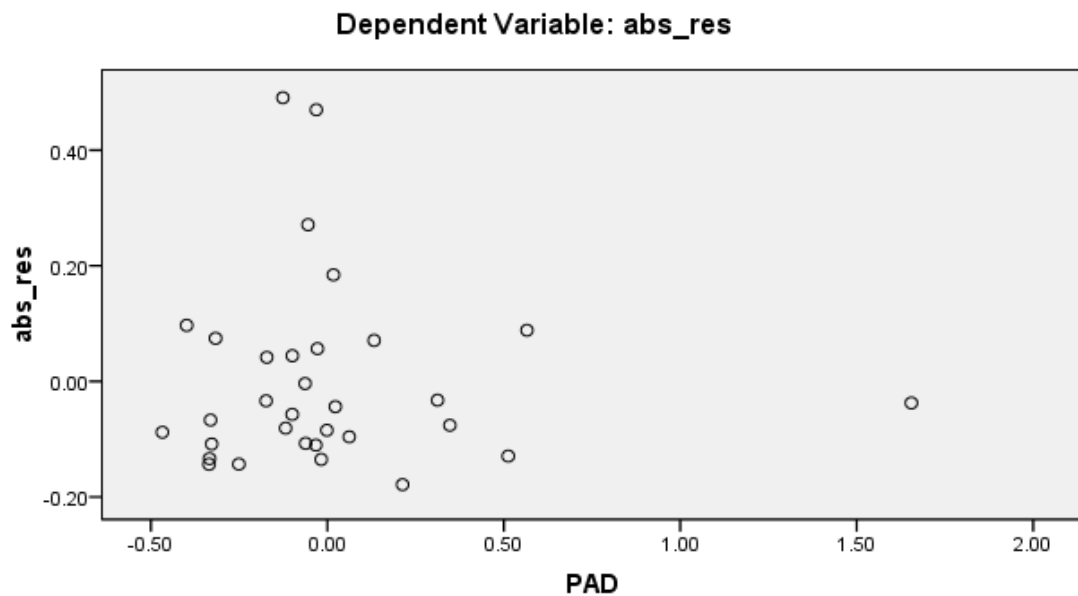
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.142	1.337		-.855	.400
PAD	-.011	.077	-.028	-.144	.886
DAU	.109	.103	.209	1.064	.296

a. Dependent Variable: abs_res

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi PAD = $0.886 > 0.05$ begitu juga nilai signifikansi DAU = $0.296 > 0.05$. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heterokedastisitas karena nilai signifikansi dari tiap-tiap variabel bebas diatas 0.05. Serta dilihat dari gambar *Scatterplot*, Pada variabel PAD dan DAU masing-masing titik menyebar secara merata atau tidak homogen dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan hasil yang demikian terbukti bahwa persamaan regresi memenuhi asumsi non-heterokedastisitas.





c. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.736 ^a	.542	.511	.26549	1.766

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BMD

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai dw = 1.766. Dari tabel *Durbin-Watson* diperoleh nilai du = 1.5736 dan nilai 4-du (1.5736)= 2.4264 dengan kriteria n =32 k=2. Jadi dapat disimpulkan bahwa $1.5736 < \mathbf{1.766} < 2.4264$ yang berarti tidak terjadi autokorelasi pada masing-masing variabel bebas.

3. Model Regresi

$$Y = -0.280 + 0.294X_1 + 0.660 X_2$$

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.280	2.119		-.132	.896		
PAD	.294	.122	.326	2.406	.023	.861	1.162
DAU	.660	.163	.550	4.059	.000	.861	1.162

a. Dependent Variable: BMD

4. Uji Hipotesis

a. Uji Partial (t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.280	2.119		-.132	.896
PAD	.294	.122	.326	2.406	.023
DAU	.660	.163	.550	4.059	.000

a. Dependent Variable: BMD

- c) Nilai t hitung PAD > t tabel = 2.406 > 2.045, yang artinya secara parsial variabel PAD (X_1) berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal (Y).
- d) Nilai t hitung DAU > t tabel = 4.059 > 2.045, yang artinya secara parsial variabel DAU (X_2) berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal (Y)

b. Uji Simultan (F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.421	2	1.211	17.176	.000 ^a
	Residual	2.044	29	.070		
	Total	4.465	31			

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BMD

Dari tabel diatas menunjukkan hasil uji $F = 17.176$ dan F tabel = 3.33, berarti F hitung $>$ F tabel = $17.176 > 3.33$, yang artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

5. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.736 ^a	.542	.511	.26549	1.766

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BMD

Tabel diatas diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2), nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.511 yang artinya bahwa presentasi sumbangan variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum) terhadap variabel dependen (Belanja Modal) sebesar 51.1% sedangkan sisanya sebesar 48.9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam metode penelitian ini.

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3912	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1097	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4697	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210	1.3258	1.7716
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214	1.3346	1.7708
51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754	1.3855	1.7218	1.3431	1.7701
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769	1.3929	1.7223	1.3512	1.7694
53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785	1.4000	1.7228	1.3592	1.7689
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800	1.4069	1.7234	1.3669	1.7684
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815	1.4136	1.7240	1.3743	1.7681
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830	1.4201	1.7246	1.3815	1.7678
57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845	1.4264	1.7253	1.3885	1.7675
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860	1.4325	1.7259	1.3953	1.7673
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875	1.4385	1.7266	1.4019	1.7672
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889	1.4443	1.7274	1.4083	1.7671
61	1.5524	1.6189	1.5189	1.6540	1.4847	1.6904	1.4499	1.7281	1.4146	1.7671
62	1.5562	1.6216	1.5232	1.6561	1.4896	1.6918	1.4554	1.7288	1.4206	1.7671
63	1.5599	1.6243	1.5274	1.6581	1.4943	1.6932	1.4607	1.7296	1.4265	1.7671
64	1.5635	1.6268	1.5315	1.6601	1.4990	1.6946	1.4659	1.7303	1.4322	1.7672
65	1.5670	1.6294	1.5355	1.6621	1.5035	1.6960	1.4709	1.7311	1.4378	1.7673
66	1.5704	1.6318	1.5395	1.6640	1.5079	1.6974	1.4758	1.7319	1.4433	1.7675
67	1.5738	1.6343	1.5433	1.6660	1.5122	1.6988	1.4806	1.7327	1.4486	1.7676
68	1.5771	1.6367	1.5470	1.6678	1.5164	1.7001	1.4853	1.7335	1.4537	1.7678
69	1.5803	1.6390	1.5507	1.6697	1.5205	1.7015	1.4899	1.7343	1.4588	1.7680
70	1.5834	1.6413	1.5542	1.6715	1.5245	1.7028	1.4943	1.7351	1.4637	1.7683

Titik Persentase Distribusi t ($df = 1 - 40$)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46673
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilitas yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.16
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis, yaitu Achmad Syaihu lahir di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1989, merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis lahir dari pasangan H. Musa Muhammad (alm.) dan Hj. Hapsah (almh). Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Jalan Raya Kelapa Dua Rt.001/08 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu Tahun 1995 di SDN 01 Kelapa Dua Pagi dan lulus pada tahun 2001. Pada tahun 2004 lulus dari SMP Negeri 189 JAKARTA dan melanjutkan ke SMA Negeri 85 JAKARTA, lulus tahun 2007. Setelah itu, melanjutkan ke jenjang perkuliahan di Jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2008. Penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011-2013” dan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan tahun 2016.